



Pemerintah Daerah
Kabupaten Berau

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu Pemerintahan Daerah. Disamping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati / Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*Pencapaian Penerapan Standar pelayanan Minimal, Capaian Kinerja Makro, Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan serta Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah*) dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kemudian di jabarkan dalam Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tanggal 27 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Dirjen OTDA No : 100.2.7/989/OTDA Tanggal 12 Februari 2026 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah Tahun Anggaran 2025

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Berau diberbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi **Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan** dan semoga Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 yang juga menyajikan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun Anggaran 2025 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 27 Maret 2026

BUPATI BERAU,

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

INSPEKTORAT

Jalan SM. Aminuddin Nomor : 1012 Telepon (0554) 22438, Fax/Telepon (0554) 21573

TANJUNG REDEB

inspektorat.berau@gmail.com <http://inspektorat.beraukab.go.id>

KODE POS 77312

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tanjung Redeb, 27 Maret 2026

PIh Inspektur,


Haidir SE

Pembina/IV a

NIP. 19691024 199903 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang.....	1
1.1. Penjelasan Umum	3
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	36
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	85
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 130
2.1. Capaian Kinerja Makro	130
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	131
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>).	132
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	169
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	174
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	 207
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	 208
4.1. Urusan Pendidikan	208
4.2. Urusan Kesehatan.....	221
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	253
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	263
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	268
4.6. Urusan Sosial.....	297
 BAB V P E N U T U P	 325



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan progress report atas hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja kunci akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga perlu regulasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sedangkan mengenai muatan LPPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 4 dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya



menjelaskan: LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan melakukan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota. Ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Gubernur menerima LPPD Kabupaten/Kota. Ringkasan hasil evaluasi LPPD Kabupaten/Kota dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyusunan LPPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang pada awalnya merupakan daerah bentukan sementara atau dengan sebutan Swapraja yang diberikan hak-hak otonomi daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPBI/92/14 tanggal 14 Agustus 1950.



Daerah bentukan sementara Berau tersebut tidak memiliki landasan hukum secara yuridis yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan yang demokratis serta desakan-desakan dari masyarakat diseluruh daerah Provinsi Kalimantan yang telah menyelenggarakan persiapan pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten, sehingga Pemerintah Pusat segera menetapkan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Daerah Otonom di Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat membentuk secara resmi Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonomi Kabupaten Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan, dengan pembagian Kalimantan wilayah timur menjadi 3 (tiga) Daerah Istimewa yang meliputi :

1. Daerah Istimewa Kutai yang terdiri dari Kawedanan Kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
2. Daerah Istimewa Berau yang terdiri dari Kawedanan Gunung Tabur dan Sambaliung;
3. Daerah Istimewa Bulongan yang terdiri dari Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan.

Adapun pembentukan 3 (tiga) Daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai Daerah Istimewa dikarenakan ke 3 (tiga) Daerah tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu bahwa Sultan Kutai dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerah di wilayah Swapraja Kutai dan Swapraja Bulongan yang sekarang dibentuk sebagai Daerah Istimewa, sedangkan Daerah Istimewa Berau



dikarenakan ke 2 (dua) Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai 1 (satu) Daerah Istimewa.

Adapun pembentukan 3 (tiga) Daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai Daerah Istimewa dikarenakan ke 3 (tiga) Daerah tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu bahwa Sultan Kutai dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerah di wilayah Swapraja Kutai dan Swapraja Bulongan yang sekarang dibentuk sebagai Daerah Istimewa, sedangkan Daerah Istimewa Berau dikarenakan ke 2 (dua) Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai 1 (satu) Daerah Istimewa.

Daerah Istimewa Berau dipimpin oleh Kepala Daerah Istimewa yang pertama kali dijabat oleh Sultan Muhammad Aminuddin dengan pusat Pemerintahan Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb. Sultan Muhammad Aminuddin memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Berau.

Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menyebabkan Daerah Istimewa Berau berubah menjadi Daerah Tingkat II Berau dan termasuk dalam cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari pembagian wilayah Provinsi Kalimantan. Daerah Tingkat II Berau dipimpin oleh Sultan Aji Raden Muhammad Ayub yang menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau yang



pertama dan menetapkan Kota Tanjung Redeb sebagai Pusat Pemerintahan Daerah Tingkat II Berau.

Pada tahun 1999 Daerah Tingkat II Berau berubah menjadi Kabupaten Berau dengan wilayah yang terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan yaitu Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay, Segah, Pulau Derawan, Talisayan dan Biduk-Biduk namun kemudian terjadi penambahan kecamatan Teluk Bayur yang merupakan gabungan sebagian wilayah kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung dan Gunung Tabur.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan kecamatan Tubaan dan kecamatan Maratua dalam Daerah Kabupaten Berau yang diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan kecamatan Tabalar dan kecamatan Maratua, serta berdasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan kecamatan Batu Putih dan kecamatan Biatan yang menyebabkan terjadi penambahan kecamatan yaitu kecamatan Tabalar merupakan bagian dari kecamatan Sambaliung dan Talisayan, kecamatan Maratua yang merupakan bagian dari kecamatan Pulau Derawan dan kecamatan Batu Putih yang merupakan bagian dari kecamatan Biduk-Biduk dan kecamatan Talisayan serta kecamatan Biatan yang merupakan bagian kecamatan Tabalar. Sehingga sampai dengan saat ini wilayah Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 (tiga belas) kecamatan yang terdiri dari wilayah kecamatan Sekitar Kota, kecamatan Pedalaman dan kecamatan Pesisir.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026



sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahun 2021-2026 yang implementasinya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

b. Data Geografis Wilayah;

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Berau Merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa. Kabupaten Berau terletak antara 116° Bujur Timur sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Berau secara administrasi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat

2. Luas Wilayah

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah $\pm 34.127,17 \text{ km}^2$ yang terdiri dari daratan $\pm 23.558,50 \text{ km}^2$ dan lautan $\pm 10.568,85 \text{ km}^2$ sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Luas wilayah Kabupaten Berau dirinci menurut kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Kelay seluas $6134,60 \text{ km}^2$ atau sekitar 17,98% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah kecamatan Tanjung Redeb dengan luasan $23,76 \text{ km}^2$ atau 0,07% dari luas wilayah secara keseluruhan. Adapun secara rinci Pembagian Luas Wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.1

Luas Wilayah Berdasarkan kecamatan Di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)	PERSENTASE (%)
1	Kelay	6.134,60	17,98
2	Talisayan	1.798,00	5,27
3	Tabalar	2.373,45	6,95
4	Biduk Biduk	3.002,99	8,80
5	Pulau Derawan	3.858,96	11,31
6	Maratua	4.118,80	12,07
7	Sambaliung	2.403,86	7,04
8	Tanjung Redeb	23,76	0,07
9	Gunung Tabur	1.987,49	5,82
10	Segah	5.166,40	15,14
11	Teluk Bayur	175,40	0,51
12	Batu Putih	1.651,42	4,84
13	Biatan	1.432,04	4,20
JUMLAH		34.127,17	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Berau

Sedangkan dirinci menurut jarak dari Ibukota kecamatan ke Ibukota Kabupaten, kecamatan yang paling jauh adalah kecamatan Biduk-Biduk sejauh 254 km dari Ibukota Kabupaten dan yang paling dekat adalah kecamatan Sambaliung dengan jarak 2 km dari Ibukota Kabupaten. Adapun secara rinci jarak dari Ibukota kecamatan ke Ibukota Kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jarak Dari Ibukota kecamatan Ke Ibukota Kabupaten

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JARAK (km)
1	Kelay	Sido Bangen	125
2	Talisayan	Talisayan	150



NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JARAK (km)
3	Tabalar	Tubaan	91
4	Biduk Biduk	Biduk-Biduk	254
5	Pulau Derawan	Tanjung Batu	112
6	Maratua	Maratua Teluk Harapan	152
7	Sambaliung	Sambaliung	2
8	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	2
9	Gunung Tabur	Gunung Tabur	11.6
10	Segah	Tepian Buah	86
11	Teluk Bayur	Teluk Bayur	10
12	Batu Putih	Batu Putih	200
13	Biatan	Biatan Lempake	120

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Berau

3. Topografi

Kabupaten Berau memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Topografi wilayah daratan Kabupaten Berau banyak berbentuk gugusan bukit yang terdapat hampir diseluruh kecamatan, terutama kecamatan Kelay yang membentang perbukitan Batu Kapur yang memiliki panjang hampir mencapai 100 mm. Dengan kondisi topografi seperti itu, maka Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam yang cukup kaya seperti batu bara, batu kapur, kayu hutan, rotan, dan hasil hutan lainnya.

Kabupaten Berau memiliki 21 sungai besar yang merupakan sumber vital bagi penduduk dan ekosistem sekitarnya. Sungai Kelay merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Berau. Mengalir dari pegunungan sekitar Gunung Mantan sepanjang 254 mm sampai pada pertemuan dengan Sungai Segah membentuk Sungai Berau di Tanjung Redeb. Sungai Segah sendiri panjangnya sekitar 152 km dimana Hulu sungai berada di sekitar Gunung Kundas. Sedangkan



Sungai Tanian Buku di kecamatan Talisayan merupakan Sungai yang terpendek dengan panjang 12 km.

Adapun Nama dan Panjang Sungai Menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Nama Dan Panjang Sungai Menurut kecamatan

NO	KECAMATAN	SUNGAI	PANJANG (KM)
1	Kelay	Kelay	254
		Long Gie	49
		Lesan	64
		Tawon	59
2	Talisayan	Sulaiman	23
		Dumaring	49
		Tanian Buku	12
		Lumbungan	18
3	Tabalar	Tabalar	49
4	Sambaliung	Suaran	19
		Inaran	22
		Bental	58
5	Gunung Tabur	Berau	292
		Lati	43
		Birang	58
		Sambarata	39
6	Segah	Segah	152
		Malinau	58
		Pura	72
		Siagung	38
		Siduung	83

Sumber : BPS Kabupate Berau



4. Iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Berau memiliki Iklim Tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan musim Penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April.

Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa, maka iklim di Kabupaten Berau juga dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada Nopember - April dan Angin Muson Timur pada Mei – Oktober.

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Berau kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang.

c. Jumlah Penduduk;

1. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, datang dan pindah (migrasi) penduduk yang disebut mutasi penduduk. Menurut data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tentang mutasi penduduk di Kabupaten Berau perkembangan penduduk yang terbanyak berasal dari penduduk yang datang (migrasi) dan penduduk yang lahir. Per tanggal 31 Desember 2025 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai angka **308.020 Jiwa** dan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak **107.982 KK**.



kecamatan Tanjung Redeb merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 79.332 jiwa, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat pemerintahan dan perekonomian yang berada di kecamatan ini sedangkan kecamatan Maratua merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan jumlah penduduk sebesar 4.063 jiwa, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat kecamatan Maratua tergolong kecamatan Sangat Terpencil yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan jalur laut dan udara.

Adapun Jumlah Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Per kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	Kelay	8.580	3.034
2	Talisayan	19.039	6.416
3	Sambaliung	49.365	17.779
4	Segah	21.367	8.124
5	Tanjung Redeb	79.332	27.352
6	Gunung Tabur	34.890	12.531
7	Pulau Derawan	15.306	5.347
8	Biduk Biduk	8.276	2.548
9	Teluk Bayur	37.995	13.572
10	Tabalar	8.639	2.970
11	Maratua	4.063	1.248
12	Batu Putih	10.658	3.536
13	Biatan	10.510	3.525
JUMLAH		308.020	107.982

Sumber Data: sumber : Disdukcapil, DKB Semester II Tahun 2025



2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk Kabupaten Berau menurut jenis kelamin dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki diantara seratus penduduk perempuan. Jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, Kabupaten Berau memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut juga terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Berau dimana angka rasio jenis kelamin mencapai lebih dari 100. Rasio jenis kelamin Kabupaten Berau pada tahun 2025 adalah sebesar 113 yang berarti terdapat 113 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan. kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar adalah kecamatan Segah yang mencapai 125, sedangkan kecamatan Maratua dan kecamatan Biduk-Biduk memiliki jumlah rasio jenis kelamin yang relatif paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 103.

Adapun Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin berdasarkan kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	SEX RATIO
1	Kelay	4.667	3.913	8.580	119
2	Talisayan	10.002	9.037	19.039	111
3	Sambaliung	26.473	22.892	49.365	116
4	Segah	11.885	9.482	21.367	125
5	Tanjung Redeb	41.375	37.957	79.332	109



NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	SEX RATIO
6	Gunung Tabur	18.926	15.964	34.890	119
7	Pulau Derawan	8.128	7.178	15.306	113
8	Biduk Biduk	4.207	4.069	8.276	103
9	Teluk Bayur	20.198	17.797	37.995	113
10	Tabalar	4.558	4.081	8.639	112
11	Maratua	2.075	1.988	4.063	104
12	Batu Putih	5.600	5.058	10.658	111
13	Biatan	5.538	4.972	10.510	111
JUMLAH		163.632	144.388	308.020	113

Sumber Data: Disdukcapil, DKB Semester II Tahun 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pembagian Wilayah Administrasi kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau dapat dilihat pada Peta Wilayah Kabupaten Berau gambar berikut:

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Berau



Sumber : Bappeda, 2016



Kabupaten Berau terdiri dari kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) kecamatan, 10 (sepuluh) Kelurahan dan 100 (seratus) Kampung. Jumlah dan Nama kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7

Jumlah Dan Nama kecamatan, Kelurahan Dan Kampung Di Kabupaten Berau

KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03	13	10	100
64.03.01	1 Kelay	-	14
64.03.01.2001			1 Merabu
64.03.01.2002			2 Panaan
64.03.01.2003			3 Merapun
64.03.01.2004			4 Muara Lesan
64.03.01.2005			5 Merasa
64.03.01.2006			6 Lesan Dayak
64.03.01.2007			7 Long Beliu
64.03.01.2008			8 Long Duhung
64.03.01.2009			9 Long Lamcin
64.03.01.2010			10 Long Keluh
64.03.01.2011			11 Long Pelay
64.03.01.2012			12 Mapulu
64.03.01.2013			13 Long Sului
64.03.01.2014			14 Sido Bangen
64.03.02	2 Talisayan	-	10
64.03.02.2002			1 Dumaring
64.03.02.2003			2 Talisayan
64.03.02.2014			3 Campur Sari
64.03.02.2015			4 Bumi Jaya
64.03.02.2016			5 Tunggal Bumi
64.03.02.2017			6 Sumber Mulya
64.03.02.2018			7 Suka Murya



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.02.2019			8 Purna Sari Jaya
64.03.02.2022			9 Eka Sapta
64.03.02.2023			10. Capuak
64.03.03	3 Sambaliung	1	13
64.03.03.2001			1 Long Lanuk
64.03.03.2002			2 Tumbit Dayak
64.03.03.2004			3 Inaran
64.03.03.2005			4 Pegat Bukur
64.03.03.2006			5 Rantau Panjang
64.03.03.2007			6 Suaran
64.03.03.2008			7 Pijanau
64.03.03.2009			8 Pesayan
64.03.03.2010			9 Sei Bebanir Bangun
64.03.03.2011			10 Gurimbang
64.03.03.2012			11 Sukan Tengah
64.03.03.1013		1 Sambaliung	
64.03.03.2014			12 Tanjung Perangat
64.03.03.2015			13 Bena Baru
64.03.04	4 Segah	-	13
64.03.04.2001			1 Long La'ai
64.03.04.2002			2 Punah Segah
64.03.04.2003			3 Long Ayap
64.03.04.2004			4 Long Ayan
64.03.04.2005			5 Punan Malinau
64.03.04.2006			6 Punan Mahkam
64.03.04.2007			7 Gunung Sari
64.03.04.2008			8 Pandan Sari
64.03.04.2009			9 Bukit Makmur
64.03.04.2010			10 Harapan Jaya
64.03.04.2011			11 Tepian Buah
64.03.04.2012			12. Batu Rajang
64.03.04.2013			13. Siduung Indah



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.05	5 Tanjung Redeb	6	-
64.03.05.1003		1 Sungai Bedungun	
64.03.05.1004		2 Tanjung Redeb	
64.03.05.1005		3 Bugis	
64.03.05.1006		4 Gayam	
64.03.05.1007		5 Karang Ambun	
64.03.05.1008		6 Gunung Panjang	
64.03.06	6 Gunung Tabur	1	10
64.03.06.2001			1 Tasuk
64.03.06.2002			2 Birang
64.03.06.1003		1 Gunung Tabur	
64.03.06.2004			3 Maluang
64.03.06.2005			4 Samburakat
64.03.06.2006			5 Sambakungan
64.03.06.2007			6 Merancang Ulu
64.03.06.2008			7 Merancang Ilir
64.03.06.2009			8 Pulau Besing
64.03.06.2010			9 Melati Jaya
64.03.06.2011			10 Batu-Batu
64.03.07	7 Pulau Derawan	-	5
64.03.07.2001			1 Pegat Batumbuk
64.03.07.2002			2 Teluk Semanting
64.03.07.2003			3 Tanjung Batu
64.03.07.2004			4 Pulau Derawan
64.03.07.2009			5 Kasai
64.03.08	8 Biduk-Biduk	-	6
64.03.08.2001			1 Biduk-Biduk
64.03.08.2002			2 Pantai Harapan
64.03.08.2003			3 Tanjung Prepat
64.03.08.2004			4 Teluk Sumbang
64.03.08.2008			5 Teluk Sulaiman
64.03.08.2009			6 Giring-Giring



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.09	9 Teluk Bayur	2	4
64.03.09.2001			1 Tumbit Melayu
64.03.09.1002		1 Teluk Bayur	
64.03.09.1003		2 Rinding	
64.03.09.2004			2 Labanan Jaya
64.03.09.2005			3 Labanan Makmur
64.03.09.2006			4 Labanan Makarti
64.03.10	10 Tabalar	-	6
64.03.10.2002			1 Tabalar Muara
64.03.10.2003			2 Tubaan
64.03.10.2004			3 Tabalar Ulu
64.03.10.2005			4 Semurut
64.03.10.2006			5 Buyung-Buyung
64.03.10.2007			6 Harapan Maju
64.03.11	11 Maratua	-	4
64.03.11.2001			1 Ma. Bohe Silian
64.03.11.2002			2 Ma. Payung-Payung
64.03.11.2003			3 Ma. Teluk Alulu
64.03.11.2004			4 Ma. Teluk Harapan
64.03.12	12 Batu Putih	-	7
64.03.12.2001			1 Tembudan
64.03.12.2002			2 Kayu Indah
64.03.12.2003			3 Batu Putih
64.03.12.2004			4 Lobang Kelatak
64.03.12.2005			5 Ampen Medang
64.03.12.2006			6 Balikukup
64.03.12.2007			7 Sumber Agung
64.03.13	13 Biatan	-	8
64.03.13.2001			1 Biatan Ulu
64.03.13.2002			2 Biatan Ilir
64.03.13.2003			3 Karang
64.03.13.2004			4 Biatan Lempake



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.13.2005			5 Manunggal Jaya
64.03.13.2006			6 Biatan Bapinang
64.03.13.2007			7 Biatan Baru
64.03.13.2008			8 Bukit Makmur Jaya

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau, 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah di Kabupaten Berau Berjumlah 45 Perangkat Daerah.

Adapun Nama dan Jumlah Perangkat Daerah serta jumlah Pegawai Pemerintahnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	
		PERDA PEMBENTUKAN	PERBUP SOTK
1	Sekretariat Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 48 Tahun 2023
2	Sekretariat DPRD	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 40 Tahun 2022
3	Inspektorat	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 19 Tahun 2023
4	Dinas Pendidikan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 20 Tahun 2023
5	Dinas Kesehatan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 15 Tahun 2023
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 39 Tahun 2023
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 18 Tahun 2023
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 54 Tahun 2016
9	Dinas Sosial	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 21 Tahun 2023
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 40 Tahun 2023
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 41 Tahun 2023
12	Dinas Pangan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 27 Tahun 2023
13	Dinas Pertanian	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 16 Tahun 2023
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 24 Tahun 2023
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 43 Tahun 2023



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	
		PERDA PEMBENTUKAN	PERBUP SOTK
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 46 Tahun 2023
17	Dinas Perhubungan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 22 Tahun 2023
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 42 Tahun 2023
19	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 38 Tahun 2023
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 12 Tahun 2023
21	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 13 Tahun 2024
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 50 Tahun 2023
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 25 Tahun 2023
24	Dinas Perikanan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 23 Tahun 2023
25	Dinastanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	Perda No 2 Tahun 2023	Perbup No 45 Tahun 2023
26	Dinas Perkebunan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 28 Tahun 2023
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Perda No 2 Tahun 2023	Perbup No 17 Tahun 2023
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 47 Tahun 2023
29	Badan Pendapatan Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 49 Tahun 2023
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 51 Tahun 2023
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 26 Tahun 2023
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 44 Tahun 2023
33	kecamatan Batu Putih	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
34	kecamatan Biatan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
35	kecamatan Biduk-Biduk	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
36	kecamatan Gunung Tabur	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
37	kecamatan Kelay	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
38	kecamatan Maratua	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
39	kecamatan Pulau Derawan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
40	kecamatan Sambaliung	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
41	kecamatan Segah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
42	kecamatan Tabalar	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
43	kecamatan Talisayan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
44	kecamatan Tanjung Redeb	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
45	kecamatan Teluk Bayur	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016

Sumber : Bagian Organisasi



Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah aparatur Sipil Negara sebanyak 9.738 Orang yang terdiri dari 4.701 PNS dan 3.491 PPPK serta 1.546 PPPK Paruh Waktu. Sebaran ASN Kabupaten Berau Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.8
Nama Perangkat Daerah Kabupaten Berau Per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
1	SEKRETARIAT DAERAH	MUHAMMAD SAID	265	166	99	8	105	-	7	113	31	1
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Plt	83	54	29	4	41	-	3	27	8	-
3	INSPEKTORAT	RIZA FAKHMI	77	49	28	-	11	-	6	50	10	-
4	DINAS PENDIDIKAN	MARDIATUL IDALISAH	4.037	1.599	2.438	52	711	51	36	3.116	71	-
5	DINAS KESEHATAN	LAMLAY SARIE	1.444	481	963	19	159	3	710	382	171	-
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI	JUSRAM	666	206	460	18	85	-	274	148	141	-
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FENDRA FIRNAWAN	214	164	50	7	75	-	13	86	31	2



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	MULYADI	49	25	24	1	11	-	-	31	6	-
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANANG SAPRANI	182	149	33	4	119	-	2	54	3	-
9	DINAS SOSIAL	ISWAHYUDI	50	26	24	-	9	-	3	30	8	-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	ZULKIFLI AZHARI	54	27	27	-	16	-	1	32	5	-
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	RABIATUL ISLAMIAH	58	19	39	5	9	-	2	37	5	-
12	DINAS PANGAN	RAKHMADI PASARAKAN	39	23	16	-	6	-	2	22	9	-
13	DINAS PERTANAHAN	SULAIMAN	35	20	15	-	9	-	-	22	4	-



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	MUSTAKIMSUHARJANA	415	249	166	139	200	-	7	59	10	-
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DAVID PAMUJI	84	51	33	-	24	-	6	51	3	-
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	TENTERAM RAHAYU	40	20	20	-	11	-	1	24	4	-
17	DINAS PERHUBUNGAN	ANDI MAREWANGENG	132	117	15	12	77	1	5	32	4	1
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DIDI RAHMADI	68	45	23	3	17	-	3	39	6	-
19	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	EVA YUNITA	185	112	73	37	92	-	4	44	7	1
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NANANG BAKRAN	48	29	19	-	9	-	4	31	4	-
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	AMIRUDDIN	63	46	17	-	31	-	2	26	4	-



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	IL YAS	86	54	32	12	32	-	3	32	7	-
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	YUDHA BUDISANTOSA	62	35	27	1	22	-	-	36	3	-
24	DINAS PERIKANAN	ABDUL MAJID	59	36	23	1	15	-	5	35	3	-
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	JUNAIDI	193	122	71	5	49	-	16	112	11	-
26	DINAS PERKEBUNAN	LITA HANDINI	66	38	28	1	14	-	13	35	3	-
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SRI EKA TAKARIYATI	69	37	32	2	12	-	4	42	9	-
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SAPRANSYAH	78	43	35	-	16	-	5	48	8	1
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	DJUPIANSYAH GANIE	66	46	20	-	17	3	4	33	8	1



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
30	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ENDAH ERNANY TRIARIANI	58	36	22	1	12	-	1	33	11	-
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SALIM	77	52	25	3	31	-	5	36	2	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MASYHADI MUHDI	131	120	11	10	82	-	3	30	6	-
33	KECAMATAN BATU PUTIH	WAHYUDI	25	19	6	-	12	-	1	8	4	-
34	KECAMATAN BIATAN	AIDIL FITRI	26	21	5	-	17	-	-	5	4	-
35	KECAMATAN BIDUK-BIDUK	Pit	33	26	7	1	17	-	1	14	-	-
36	KECAMATAN GUNUNG TABUR	LUTFI HIDAYAT	38	26	12	2	20	-	-	16	-	-
	KELURAHAN GUNUNG TABUR	ACHMAD RIZHALI	12	10	2	-	7	-	1	2	2	-



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
37	KECAMATAN KELAY	TORIS	19	16	3	-	5	-	1	11	1	1
38	KECAMATAN MARATUA	ARIYANTO	32	24	8	5	11	-	1	14	1	-
39	KECAMATAN PULAU DERAHAN	SAMUDDIN AMBA KADANG	26	22	4	1	15	-	-	9	1	-
40	KECAMATAN SAMBALIUNG	AHMAD JUHRI	40	27	13	1	15	-	2	20	1	1
	KELURAHAN SAMBALIUNG	ISKANDAR ZULKARNAIN	16	11	5	-	5	-	1	10	-	-
41	KECAMATAN SEGAIH	NOOR ALAM	25	19	6	-	7	-	3	14	1	-
42	KECAMATAN TABALAR	TRI ANGGORO RAHARDJO	25	21	4	2	12	-	-	10	1	-
43	KECAMATAN TALISAYAN	YUSUP GUNAWAN	28	21	7	3	11	-	1	11	2	-



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
44	KECAMATAN TANJUNG REDEB	YUSUP GUNAWAN	28	16	12	-	10	-	1	12	5	-
	KELURAHAN TANJUNG REDEB	TRI WAHYU SUSILO	12	9	3	-	6	-	1	4	1	-
	KELURAHAN GUNUNG PANJANG	SABARUDDIN	13	7	6	-	4	-	-	3	5	1
	KELURAHAN GAYAM	PURWAWIJOYO	12	4	8	2	3	-	-	6	1	-
	KELURAHAN KARANG AMBUN	MULIANA	13	7	6	2	4	-	1	5	1	-
	KELURAHAN BUGIS	Pit	14	7	7	-	6	-	1	7	-	-
	KELURAHAN BEDUNGUN	YUDI SASMITA	12	8	4	-	5	-	1	6	-	-
45	KECAMATAN TELUK BAYUR	EDI BASKORO	29	20	9	1	14	-	1	13	-	-



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/II	DIII	DIV/S1	S2	S3
	KELURAHAN TELUK BAYUR	Plt	12	7	5	1	5	-	-	6	-	-
	KELURAHAN RINDING	MISRIN	15	11	4	2	3	-	1	6	3	-
TOTAL			9.738	4.655	5.083	368	2.343	58	1.169	5.140	650	10

Sumber : BKPSDM Kabupaten Berau



f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tabel 1.9

Target dan realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Berau pada Tahun 2025, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.367.930.573.905,72	5.076.692.596.726,18	94,57	6.193.996.172.870,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.156.435.995,00	324.354.164.390,18	80,85	343.450.025.949,60
4.1.01	Pajak Daerah	175.513.778.000,00	144.942.853.267,00	82,58	91.558.760.332,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	338.763.210,00	56,46	290.417.433,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	65.424.000,00	43,61	555.240,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	49.560.758,00	3,30	62.532.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	109.770.200,00	18,29	194.609.268,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	5.724.234.995,00	104,07	4.361.315.759,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000,00	17.549.985.013,00	109,68	15.277.432.416,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	75.401.139.000,00	73.050.865.313,00	96,88	71.371.898.216,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	33.762.639.000,00	18.841.643.938,00	55,80	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	42.000.000.000,00	29.212.605.840,00	69,55	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	120.583.732.356,00	110.313.931.998,96	91,48	18.110.450.696,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	115.813.391.556,00	103.801.843.899,04	89,62	12.892.846.872,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.086.340.800,00	4.715.992.115,00	115,40	4.356.814.960,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	684.000.000,00	1.796.095.984,92	262,58	860.788.864,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.997.643.845,00	11.397.496.922,15	94,99	17.986.298.143,26
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	28.000.000,00	27.853.077,00	99,47	499.997.100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.969.643.845,00	11.369.643.845,15	94,98	16.486.306.843,26
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	999.994.200,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.061.281.794,00	57.699.882.202,07	62,00	215.794.516.778,34
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	171.535.851,00	42,88	1.640.646.616,88
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	35.993.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	15.544.432.794,00	16.348.756.794,68	105,17	9.993.490.434,68
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	49.222.664.000,00	16.892.922.138,75	34,31	87.224.951.102,32
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.818.705.000,00	20.111.997.343,82	228,06	18.336.886.530,20
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	161.779.799,91	0,00	2.383.324.421,20
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.080.351.647,60	0,00	717.916.612,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	67.203.389,00	0,00	29.598.682,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.076.953.169,83	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.075.480.000,00	763.403.934,48	70,98	95.399.283.552,06
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	24.978.133,00	0,00	32.425.827,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	401.156.435.995,00	324.354.164.390,18	80,85	343.450.025.949,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.949.130.788.110,72	4.726.278.827.066,00	95,49	5.774.506.770.500,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.027.833.198.265,72	3.961.274.326.589,00	98,34	4.959.421.374.192,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	4.847.083.601.192,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.252.374.465.265,72	3.167.813.850.753,00	97,40	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	513.054.929.000,00	559.545.218.013,00	109,06	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.873.858.000,00	143.292.027.979,00	93,12	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.919.303.252.265,72	3.870.651.096.745,00	98,75	4.847.083.601.192,00
4.2.01.05	Dana Desa	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36	95.468.642.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	100,00	16.869.131.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	108.529.946.000,00	90.623.229.844,00	83,50	112.337.773.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,03	815.085.396.308,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	583.697.589.845,00	427.404.500.477,00	73,22	459.125.396.308,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00	355.960.000.000,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,03	815.085.396.308,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	4.949.130.788.110,72	4.726.278.827.066,00	95,49	5.774.506.770.500,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.339.290.200,00	12.629.276.824,00	94,67	10.420.888.331,00
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	13.203.878.146,00	0,00	65.618.488.089,69
4.3.03.05	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	4.304.059.600,00	226.450.300,00	5,26	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
	JUMLAH PENDAPATAN	5.367.930.573.905,72	5.076.692.596.726,18	94,57	6.193.996.172.870,29
5	BELANJA DAERAH	6.041.361.617.000,00	5.477.482.299.028,18	90,66	6.411.776.301.938,05
5.1	BELANJA OPERASI	2.458.375.030.613,47	2.059.053.083.536,93	83,75	2.111.530.856.755,59
5.1.01	Belanja Pegawai	1.240.784.884.524,50	1.041.586.531.467,00	83,94	1.038.160.066.708,34
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	582.097.614.379,50	476.440.970.481,00	81,84	432.431.609.487,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	622.833.861.081,00	532.408.643.132,00	85,48	423.491.512.345,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	118.309.086.797,05
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.297.502.940,00	20.172.941.944,00	90,47	19.235.787.269,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.357.166.124,00	669.011.910,00	49,29	448.013.086,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	925.500.000,00	912.480.000,00	98,59	860.400.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.273.240.000,00	10.982.484.000,00	97,42	43.383.657.724,29
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.220.505.794,97	854.413.659.354,62	82,05	868.596.837.598,25
5.1.02.01	Belanja Barang	178.581.017.012,43	145.484.674.484,72	81,46	147.944.507.469,75



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02	Belanja Jasa	508.180.351.231,38	400.993.530.810,00	78,90	394.952.774.306,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.750.097.352,55	37.765.345.618,00	88,33	48.129.553.534,56
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	156.422.254.630,00	133.706.507.937,80	85,47	177.636.934.571,30
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.916.980.412,00	21.128.299.434,00	92,19	14.566.901.400,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	26.890.101.822,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	30.741.221.756,61	29.390.360.499,00	95,60	406.914.888,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.698.661.200,00	7.588.407.298,00	70,92	6.166.040.825,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.929.922.200,00	78.356.533.273,10	86,17	51.903.108.781,64
5.1.05	Belanja Hibah	166.224.640.294,00	153.051.392.715,31	92,07	189.599.952.449,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	159.489.892.838,00	146.368.025.488,31	91,77	188.665.103.999,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.115.757.456,00	1.114.448.759,00	99,88	934.848.450,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.618.990.000,00	5.568.918.468,00	99,10	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.145.000.000,00	10.001.500.000,00	98,58	15.174.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.363.000.000,00	8.276.500.000,00	98,96	6.231.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	8.748.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.497.000.000,00	1.440.000.000,00	96,19	195.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.458.375.030.613,47	2.059.053.083.536,93	83,75	2.111.530.856.755,59
5.2	BELANJA MODAL	3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96	3.828.768.208.935,46
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.391.573.880,00	6.937.492.376,00	45,07	1.352.415.463,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	15.391.573.880,00	6.937.492.376,00	45,07	1.352.415.463,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.970.783.032,28	252.680.070.744,00	94,64	259.968.567.330,29
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.081.859.159,00	1.027.859.216,00	95,00	4.143.312.274,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	26.465.264.009,00	24.918.092.453,00	94,15	38.702.110.978,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	268.468.907,00	201.633.314,00	75,10	103.819.392,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	349.603.126,00	338.160.757,00	96,72	126.507.550,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.484.311.035,00	32.552.575.353,00	94,39	45.851.028.127,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.603.588.712,28	5.356.545.180,00	95,59	14.596.736.251,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	75.476.783.329,00	69.442.041.955,00	92,00	10.269.880.156,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.099.239.640,00	9.454.740.698,00	85,18	4.015.496.170,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	34.996.029.426,00	34.122.362.985,00	97,50	32.765.178.511,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	21.151.085,00	20.949.000,00	99,04	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	260.006.400,00	250.612.470,00	96,38	10.500.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	296.955.321,00	286.581.700,00	96,50	253.850.620,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	61.884.463.200,00	60.664.228.985,00	98,02	92.388.565.817,29
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	70.989.000,00	67.364.000,00	94,89	270.840.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	12.541.998.984,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.402.306.633,00	11.245.636.823,00	98,62	586.060.150,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.209.764.050,00	2.730.685.855,00	85,07	3.342.682.350,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.389.632.338,48	336.504.620.292,25	93,37	472.685.076.375,72
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	332.511.455.909,48	311.111.634.031,25	93,56	429.750.956.792,72
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	358.859.195,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	49.998.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.863.176.429,00	1.679.048.261,00	90,11	2.966.595.088,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	26.015.000.000,00	23.713.938.000,00	91,15	39.558.667.300,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.432.439.129.612,00	2.354.928.867.530,00	96,81	3.081.747.295.756,45
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.426.521.095.718,00	1.385.914.267.899,00	97,15	1.859.571.958.318,60
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	980.034.848.074,00	945.329.245.295,00	96,45	1.201.639.662.369,85
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	25.070.135.820,00	22.912.064.087,00	91,39	20.535.675.068,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	657.250.000,00	620.407.000,00	94,39	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	155.800.000,00	152.883.249,00	98,12	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.282.893.923,00	13.974.090.596,00	97,83	8.338.136.101,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.890.802.852,00	7.779.145.565,00	98,58	1.695.729.650,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	99.000.000,00	98.790.000,00	99,78	5.013.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	6.550.832.701,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.293.091.071,00	6.096.155.031,00	96,87	86.560.750,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.434.000.000,00	2.001.980.765,00	82,25	4.676.717.909,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.434.000.000,00	2.001.980.765,00	82,25	4.676.717.909,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96	3.828.768.208.935,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
5.4	BELANJA TRANSFER	463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02	465.702.436.664,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00	11.030.633.000,00	99,33	11.024.007.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.855.000.000,00	9.789.254.000,00	99,33	9.538.723.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.241.379.000,00	99,31	1.485.284.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	452.880.656.000,00	434.509.960.188,00	95,94	454.678.429.664,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	434.509.960.188,00	96,00	454.678.429.664,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02	465.702.436.664,00
	JUMLAH BELANJA	6.041.361.617.000,00	5.477.482.299.028,18	90,66	6.411.776.301.938,05
	SURPLUS/DEFISIT	(673.431.043.094,28)	(400.789.702.302,00)	59,51	(217.780.129.067,76)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	891.211.172.162,04
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	893.211.172.162,04
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	893.211.172.162,04
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	3.193.499,80	0,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	673.431.043.094,28	673.431.043.094,28	100,00	893.211.172.162,04
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	893.211.172.162,04
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	891.211.172.162,04
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	272.644.534.292,08	0,00	673.431.043.094,28

Sumber Data : Simda Keuangan Per 23 Februari 2026

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Tak terkecuali dalam perencanaan pembangunan RKPD 2025 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) Kabupaten Berau Menurut Sasaran Pembangunan Daerah:

Tabel 1.10

Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Berau

FOKUS	FOKUS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD 2021-2026)	Permasalahan
Perekonomian Daerah	Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif dan akan semakin rendah di tengah pelambanan ekonomi global	Meningkatnya produksi sektor <i>primer</i>



FOKUS	FOKUS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD 2021-2026)	Permasalahan
	Perekonomian didominasi oleh sektor primer (Pertambangan dan Perkebunan) yang sangat tergantung pada permintaan ekspor	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)
	Pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh secara signifikan pada upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan;	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>
	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal	Menurunnya angka Pengangguran di Kabupaten Berau
Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang cenderung meningkat. Untuk P1 meningkat dari 0,57 di tahun 2018 menjadi 0,66 di tahun 2019 dan P2 dari meningkat 0,11 di tahun 2018 menjadi 0,12 di tahun 2019. Angka kemiskinan akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global, nasional dan daerah	
Angka Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global, nasional dan daerah.	
Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh angka usia harapan hidup Kabupaten Berau (71,94) masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kaltim (74,22)	
	Masih rendahnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh angka Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,31 dan 9,25, masih di bawah Provinsi Kaltim dengan nilai 13,69 dan 9,70 di tahun 2019	
	Masih rendahnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran perkapita (Rp.12.726.000/tahun di tahun 2019) dan akan semakin rendah karena pengaruh pelambatan ekonomi	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan
Tata kelola Pemerintahan	Masih tingginya ketergantungan fiskal pada dana perimbangan (69,96%) dan akan semakin terbatas sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan pelambatan ekonomi;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah

Sumber Data: RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025



b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah
“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Adapun penjelasan dari Visi Kabupaten Berau di atas adalah sebagai berikut :

MAJU

Maju adalah suatu kondisi yang dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Berau yang Maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.

SEJAHTERA

Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.



SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021- 2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dari keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan

TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Berau selama ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Berau. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan (*unrenewable resources*) di sektor Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumberdaya ekonomi terbarukan (*renewable*



resources) seperti Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM.

Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumberdaya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.

Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa



yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif *United Nation Development Program (UNDP)*.

Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau.



Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber



daya ekonomi terbarukan (*renewable resources*), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien ke dan dari Kabupaten Berau. Di samping itu, telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semakin penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat ini dan terlebih lagi di masa mendatang, ekonomi digital dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus mengantisipasi tantangan pembangunan di era digital ini, dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampir ke semua jenis usaha.



4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi,



tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Berau tahun 2021-2026. Program-program prioritas pada masing-masing strategi ini disebut sebagai program pembangunan daerah yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau.

➤ Program Prioritas I: Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:

- 1) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 4) Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

➤ Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu



diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2021-2026, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki 18 janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau. 18 janji kampanye tersebut antara lain:

- 1) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP;
- 2) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT;
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B termasuk Layanan PCR Gratis;
- 4) Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga yang Tidak Mampu;
- 5) Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 6) Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis hingga ke tingkat kampung;
- 7) Peningkatan Infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian Kampung dan Kota;
- 8) Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu;
- 9) Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD);
- 10) Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung;
- 11) Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat;
- 12) Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19;



- 13) Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain);
- 14) Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi;
- 15) Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata;
- 16) Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM;
- 17) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM yang Profesional Berbasis Digital Teknologi;
- 18) Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.2 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.11

Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinkes
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	Disnakertrans
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas. 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
	Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat		
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
16	Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskoperindag
17	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
18	Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Kawasan Pemukiman	Disperkim
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim



Tabel 1.12
Program Prioritas pembangunan

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur									401.504. 628.399		544.555.89 7.712		644.519.24 2.282		1.133.566 .174.902		688.145.63 7.509		730.223.2 48.346		3.961.761.892. 550	
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing				Indek Pembangunan Manusia		74,71	74,99	401.504. 628.399	75,10	544.555.89 7.712	75,50	644.519.24 2.282	75,89	1.133.566 .174.902	76,29	688.145.63 7.509	76,69	730.223.2 48.346	76,69	3.961.761.892. 550		
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan				Harapan Lama Sekolah		13,32	13,53	136.318. 867.889	14,10	195.025.90 4.218	14,29	267.848.51 3.138	14,47	270.165.8 92.650	14,65	269.017.71 3.238	14,83	283.588.6 35.416	14,83	1.421.965.526. 550		
				Rata-rata Lama Sekolah		9,52	9,69		9,70		9,84		9,98		10,12		10,26		10,26			
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		75,14	76,17	134.078. 736.589	77,22	190.810.32 3.018	78,28	263.501.01 3.138	79,35	265.605.7 67.650	80,44	264.234.33 1.988	81,54	278.570.8 35.104	81,54	1.396.801.007. 487	Dinas Pendidikan	
				Angka partisipasi kasar SD/MI		104,29	105,33		106,39		107,45		108,52		109,61		110,71		110,71			
				Angka partisipasi kasar SMP/MTS		95,82	96,78		97,75		98,72		99,71		100,00		100,00		100			
				Angka Partisipasi Murni SD/MI		95,79	96,18		96,58		96,97		97,37		97,77		98,17		98,17			
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS		76,53	78,37		80,25		82,18		84,15		86,17		88,24		88,24			
				Angka partisipasi sekolah SD/MI		100,34	101,34		102,36		103,38		104,41		105,46		106,51		106,51			
				Angka partisipasi sekolah SMP/MTS		91,85	92,77		93,70		94,63		95,58		96,54		97,50		97,50			
				Angka Putus Sekolah SD/MI		0,02	0,01		0		0		0		0		0,00		0,00			



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,02		0,01		0		0		0		0,00		0,00				
				Angka Kelulusan																		
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100		100		100		100		100		100,00		100				
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100		100		100		100		100		100,00		100				
				Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105,59	100,00		100,00		100		100		100		100		100				
				Angka melek huruf	99,42	99,46		99,49		99,53		99,56		99,6		99,64		99,64				
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	68,25		71,66		75,25		79,01		82,96		87,11		87,11				
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV			2.240.131.300		4.215.581.200		4.347.500.000		4.560.125.000		4.783.381.250		5.017.800.313		25.164.519.062.50	Dinas Pendidikan		
				PAUD	33,13	33,46		33,80		34,13		34,48		34,82		35,17		35,17				
				SD	76,36	77,12		77,89		78,67		79,46		80,26		81,06		81,06				
				SMP	94,38	95,32		96,28		97,24		98,21		99,19		100,00		100				
				Rasio murid/guru sekolah																		
				Rasio murid/guru SD Negeri	15	15		15		15		15		15		15,00		15,00				
				Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19				
				Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36				
				Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76				



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata																	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan					Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	265.185.760.510	72,28	349.529.993.494	72,38	376.670.729.144	72,49	863.400.282.252	72,60	419.127.924.271	72,71	446.634.612.929	72,71	2.539.796.366.000		
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70 %		29,60%		44,90 %		66,60 %		99,90%		100%		100%			
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi kurang	7,30	7,80	166.362.353.500	7,80	233.911.501.400	7,80	248.861.162.940	7,80	723.210.957.928	7,80	265.698.795.314	7,80	278.719.908.877	7,80	1.736.011.743.359	Dinas Kesehatan		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,00	22,00		20,00		19,00		18,00		18,00		18,00						
				Jumlah kematian ibu melahirkan	8,00	10,00		10,00		9,00		8,00		8,00		7,00		7,00				
				Angka kematian anak balita	15,00	17,00		16,00		15,00		15,00		15,00								
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)/ODF	30,00	60,00		80,00		90,00		95,00		98,00		100,00		100,00				
				Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60,00	67,00		70,00		75,00		80,00		83,00		85,00		85,00				
				Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				(KLB) / Wabah < 24 jam																		
				Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)	59,00	110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		85,00						
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00						



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,90	93,60		94,10		94,60		95,00		95,00		95,00					
			Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79,00	85,00		87,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00			
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,49		0,48		0,47		0,46		0,45		0,85		0,85			
			Angka kejadian Malaria	0,00	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1			
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79,00	100,00	4.122.686.896	100,00	10.355.968.000	100,00	11.737.162.000	100,00	12.100.594.000	100,00	12.316.713.000	100,00	12.536.056.000	100,00	63.169.179.896	Dinas Kesehatan			
				Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00							
				Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103,00	110,00		120,00		125,00		135,00		140,00		145,00							



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Jumlah Tenaga Bidan	303,00	310,00		320,00		325,00		330,00		335,00		340,00				
					Jumlah Tenaga Perawat	584,00	600,00		615,00		630,00		645,00		660,00		675,00				
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100,00	100,00	936.677. 000	100,00	100,00	100,00	1.476.453.0 00	100,00	1.831.184 .000	100,00	2.297.015. 000	100,00	2.914.807 .000	100,00	10.622.698.000	Dinas Kesehatan	
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70,00		73,00		76,00		80,00		82,00		85,00					
				Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00					
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan	59,00	83,80	790.000. 000	87,90	1.275.000.0 00	91,60	1.384.500.0 00	95,00	1.615.950 .000	95,00	1.679.545. 000	95,00	1.550.499 .500	95,00	8.295.494.500	Dinas Kesehatan	
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)	3,8	35,00		45,00		50,00		55,00		55,00							
				Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten	100%	100%	92.157.2 71.804	100%	101.372.99 8.984	100%	111.510.29 8.883	100%	122.661.3 28.771	100%	134.927.46 1.648	100%	148.420.2 07.813	100%	711.049.567.90 4	RSUD dr. Abdul Rivai
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit	100%	100%	496.820. 100	100%	546.502.11 0	100%	601.152.32 1	100%	661.267.5 53	100%	727.394.30 8	100%	800.133.7 39	100%	3.833.270.132	RSUD dr. Abdul Rivai



Pemerintah Kabupaten Berau

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	1	4	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 1519) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 1	19 per 1000 kelahira n	18 per 1000 kelahir a n	319.951. 210	17 per 1000 kelahira n	901.461.00 0	16 per 1000 kelahi ra n	1.100.000.0 00	15 per 1000 kelahi ra n	1.319.000 .000	14 per 1000 kelahira n	1.481.000. 000	13 per 1000 kelahira n	1.693.000 .000	13 per 1000 kelahira n	6.814.412.210	DPPKBPPPA	
Misi 2: Meningkatkan ekonomi sektor hilir sumber daya alam c berbasis kerakyatan dengan pe pengembangan usaha berbasis				masyarakat dengan optimalisasi an pertanian dalam arti luas yang rluasan lapangan kerja dan pariwisata dan kearifan lokal				74.487.5 99.790		159.198.90 6.194		125.965.32 8.287		141.186.8 43.768		143.229.57 5.599		155.750.9 74.200		799.819.227.83 8		
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing				Laju Pertumbuhan ekonomi		-3,35	1,29	55.568.4 21.924	2,29	65.748.088. 194	3,79	66.742.128. 287	4,29	74.351.84 3.768	4,79	77.437.625 .599	5,29	82.882.82 9.200	5,29	422.730.936.97 2		
Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau				Tingkat Pengangguran terbuka		5,08	4,96	974.999. 818	4,84	4.359.072.0 00	4,73	4.772.000.0 00	4,62	5.538.200 .000	4,51	6.132.020. 000	4,41	6.765.222 .000	4,41	28.541.513.818		
2	7	3		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70%	70%	629.999. 818	70%	1.284.072.0 00	75%	1.342.000.0 00	75%	1.476.200 .000	75%	1.623.820. 000	80%	1.786.202 .000	80%	8.142.293.818	DISNAKERT RANS	
2	7	4		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	20%	20%	70.000.0 00	25%	2.475.000.0 00	25%	2.750.000.0 00	30%	3.314.000 .000	30%	3.685.400. 000	35%	4.073.940 .000	35%	16.368.340.000	DISNAKERT RANS	
2	7	5		Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	275.000. 000	100%	600.000.00 0	100%	680.000.00 0	100%	748.000.0 00	100%	822.800.00 0	100%	905.080.0 00	100%	4.030.880.000	DISNAKERT RANS	
Menurunnya Angka Kemiskinan				Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan		5,19	5,13	54.593.4 22.106	5,07	61.389.016. 194	5,01	61.970.128. 287	4,95	68.813.64 3.768	4,90	71.305.605 .599	4,84	76.117.60 7.200	4,84	394.189.423.15 4		
1	6	2		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani		100%	1.160.00 0.000	100%	1.910.000.0 00	100%	1.625.000.0 00	100%	3.750.000 .000	100%	1.500.000. 000	100%	4.100.000 .000	100%	14.045.000.000	Dinas Sosial	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi		100%		100%	3.754.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.730.000.000	100%	14.674.000.000	Dinas Sosial	
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100%		100%	365.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	1.945.000.000	Dinas Sosial	
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	TAD	50	1.764,998.909	80	3.150.000.000	100	3.770.000.000	120	4.600.000.000	150	5.430.000.000	160	6.050.000.000	160	24.764.998.909	DPMK	
				Persentase LPM Berprestasi	TAD	100		100		100		100		100		100					
				Persentase PKK aktif	100	100		100		100		100		100		100					
				Persentase Posyandu aktif	26,4	26,4		100		100		100		100		100					
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	10		15		20		25		30		35					
4	1	2	Program Pemerintahan Dan	Presentase meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	100%	100%	1.145.000.000	100%	2.453.800.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	13.598.800.000	Bagian TAPEM	
			Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Daerah kab. Berau																	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama, mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat	100%	100%	29.530.000.000	100%	30.650.000.000	100%	30.150.000.000	100%	32.450.000.000	100%	34.522.000.000	100%	34.796.000.000	100%	192.098.000.000	Bagian Kesra	
				Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi & terkoordinir.		87%	900.000.000	90%	1.690.000.000	92%	1.913.000.000	95%	2.099.300.000	97%	2.329.230.000	98%	2.523.153.000	98%	11.454.683.000	Bagian Hukum dan KD	
7	1	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	20.093.423.197	100%	17.416.216.194	100%	18.887.128.287	100%	20.289.343.768	100%	21.899.375.599	100%	23.023.454.200	100%	121.608.941.245	kecamatan
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan				PDRB Per Kapita (Juta Rp)	148,90	151,45	18.919.177.866	154,04	93.450.818.000	156,67	59.223.200.000	159,35	66.835.000.000	162,08	65.791.950.000	164,85	72.868.145.000	164,85	377.088.290.866		
Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)				Presentase Usaha mikro dan kecil	24%	0%	1.760.000.000	6%	1.760.000.000	3%	2.100.000.000	2%	2.460.000.000	2%	2.820.000.000	3%	3.140.000.000	40%	14.040.000.000		
2	17	7		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	45%	0%	960.000.000	5%	550.000.000	5%	590.000.000	5%	630.000.000	5%	670.000.000	5%	710.000.000	70%	4.110.000.000	DISKOPERIN DAG
2	17	8		Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000 UMKM	5 UKM	120.000.000	5 UKM	170.000.000	10 UKM	200.000.000	15 UKM	250.000.000	20 UKM	300.000.000	25 UKM	350.000.000	25 UKM	1.390.000.000	DISKOPERIN DAG
3	30	2		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	80.000.000	120 SKA	100.000.000	150 SKA	150.000.000	180 SKA	200.000.000	200 SKA	250.000.000	220 SKA	260.000.000	1220 SKA	1.040.000.000	DISKOPERIN DAG
3	30	3		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	250.000.000	3 Pasar	400.000.000	3 Pasar	450.000.000	4 Pasar	500.000.000	4 Pasar	550.000.000	4 Pasar	600.000.000	4 pasar	2.750.000.000	DISKOPERIN DAG



Pemerintah Kabupaten Berau

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab									
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp							
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
3	3	0	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12	Lapora n	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	450.000.000	DISKOPERIN DAG						
3	3	0	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	0		300.000.000	0,2%	480.000.000	0,2%	640.000.000	0,2%	800.000.000	0,2%	960.000.000	0,2%	1.120.000.000	1%	4.300.000.000	DISKOPERIN DAG						
Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,97			3.143.574.986	0,98	22.460.160.000	0,99	18.035.000.000	1,00	21.695.000.000	-	23.500.000.000	-	27.220.000.000	1,03	116.053.734.986							
3	2	6	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang		2.018.576.012	195.159 Orang	15.295.160.000	214.674 Orang		11.035.000.000	236.141 Orang	12.845.000.000	259.755 Orang	13.300.000.000	270.355 Orang	16.020.000.000	270.355 Orang	70.513.736.012	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
					Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari									
3	2	6	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	7	Destinasi Wisata	339.999.774	7	Destinasi Wisata	2.200.000.000	7	Destinasi Wisata	2.550.000.000	7	Destinasi Wisata	3.050.000.000	8	Destinasi Wisata	3.600.000.000	8	Destinasi Wisata	3.900.000.000	8	Destinasi Wisata	15.639.999.774	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2	6	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	30	Orang	64.999.800	30	Orang	2.300.000.000	60	Orang	2.250.000.000	90	Orang	2.300.000.000	120	Orang	2.350.000.000	150	Orang	2.350.000.000	150	Orang	11.614.999.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	2	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	5	Event	719.999.400	6 Event	2.665.000.000	7	Event	2.200.000.000	7	Event	3.500.000.000	7	Event	4.250.000.000	7	Event	4.950.000.000	7	Event	18.284.999.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Meningkatnya Produksi Sektor Primer				Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		11,64	11,71		12.865.602.880	11,79	65.550.658.000	11,86	35.293.200.000	11,94	38.345.000.000	12,01	34.871.950.000	12,09	37.778.145.000	12,09	224.704.555.880							
3	2	7	2		Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.000		2.250.000	2.317.500		2.385.000		2.475.000		2.520.000		2.520.000		9.556.381.174	Dinas Perkebunan							



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kelapa Dalam	3,483	4,071	703.986. 174	5,571	1.450.000.0 00	6,871	1.595.000.0 00	8,371	1.754.500 .000	9,471	1.929.950. 000	9,980	2.122.945 .000	9,980		
				Kakao	788	900		1,200		1,400		1,700		1,950		2,100		2,100		
				Karet	82	185		205		255		300		400		515		515		
				Lada	827	919		1,019		1,219		1,340		1,455		1,500		1,500		
3	2	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Luas Kebun yang dikembangkan		50	119.996. 760	60	1.675.000.0 00	100	1.700.000.0 00	100	1.750.000 .000	100	2.075.000. 000	100	2.175.000 .000	100	9.494.996.760	Dinas Perkebunan
			Prasarana Pertanian																	
3	2	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3,000	5000	306.283. 916	6000	2.030.000.0 00	7500	2.460.000.0 00	10000	2.525.000 .000	12500	2.580.000. 000	15000	2.655.000 .000	15000	12.556.283.916	Dinas Perkebunan
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	174.991. 800	15	450.000.00 0	20	550.000.00 0	20	550.000.0 00	25	650.000.00 0	25	650.000.0 00	130	3.024.991.800	Dinas Perkebunan
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelomp ok Tani	10 Kelom p ok Tani	378.714. 800	10 Kelomp ok Tani	1.150.000.0 00	10 Kelo mp ok Tani	1.255.000.0 00	10 Kelo mp ok Tani	1.275.000 .000	10 Kelomp ok Tani	1.280.000. 000	10 Kelomp ok Tani	1.285.000 .000	60 Kelomp ok Tani	6.623.714.800	Dinas Perkebunan
3	2	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	2.789.89 8.494	3,15	22.124.500. 000	3,26	9.945.000.0 00	3,37	10.920.00 0.000	3,49	12.120.000 .000	3,62	13.332.00 0.000	3,62	71.231.398.494	Dinas TPHP
				Produktivitas Jagung	5	5,55		5,65		5,75		5,85		5,95		6				
				Produktivitas Cabai (Besar, Keniting, dan Rawit)	4	3,62		3,77		3,9		4,02		4,17		4,25				
				Produksi Daging Sapi	470	472,35		474,71		477,0 9		479,4 7		481,87		484,28		484,28		



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Produksi Telur Ayam Ras	1,753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		2093,17		
3	27	3		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	799.973.232	300	7.645.000.000	400	2.145.000.000	450	2.393.000.000	550	2.675.000.000	550	2.942.500.000	550	18.600.473.232	Dinas TPHP
3	27	5		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	199.999.800	2535	2.788.900.000	3305	1.998.200.000	4000	2.477.500.000	4700	2.942.000.000	5000	3.236.200.000	5000	13.642.799.800	Dinas TPHP
3	27	6		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		33	273.876.200	33	1.125.000.000	40	1.400.000.000	42	1.525.000.000	44	1.675.000.000	45	1.842.500.000	45	7.841.376.200	Dinas TPHP
3	27	7		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	596.875.088	85	2.230.000.000	86	2.020.000.000	87	2.750.000.000	88	1.420.000.000	89	1.562.000.000	89	10.578.875.088	Dinas TPHP
3	25	3		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20.448,98 ton	23.399,74 ton	5.267.221.788	24.101,3 ton	17.942.258.000	24.824,78 ton	7.425.000.000	25569,53	7.275.000.000	26336,61	2.275.000.000	27126,71	2.675.000.000	27126,71	42.859.479.788	Dinas Perikanan
3	25	4		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya		2.379.90 ton	1.253.784.828	2.403,7 ton	3.410.000.000	2.427,74 ton	1.600.000.000	2.452.01 ton	1.650.000.000	2.476,53 ton	1.750.000.000	2.501,30 ton	1.800.000.000	2.501,30 ton	11.463.784.828	Dinas Perikanan
3	25	6		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				4.486,31 ton	1.530.000.000	4,620.90 ton	1.200.000.000	4,759.53 ton	1.500.000.000	4,902,32 ton	1.500.000.000	5,049,39 ton	1.500.000.000	5,049,39 ton	7.230.000.000	Dinas Perikanan
Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan					Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	1.150.000.000	80,00	3.680.000.000	82,00	3.795.000.000	83,00	4.335.000.000	84,10	4.600.000.000	85,10	4.730.000.000	85,10	22.290.000.000	
2	9	2		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	Jumlah Ketersediaan pangan utama (beras)	26.694 ton	20.000 ton	50.000.000	20.500 ton	830.000.000	21.000 ton	950.000.000	21.500 ton	1.030.000.000	22.000 ton	1.100.000.000	22.500 ton	1.000.000.000	22.500 ton	4.960.000.000	Dinas Pangan



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan																	
2	9	3		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,05	78,05		80,00	82,00		83,00		84,10		86,00		86,00			Dinas Pangan
					Persentase Penguatan cadangan pangan	50%	60%	950.000. 000	2.350.000.0 00	2.320.000.0 00	2.680.000 .000	2.850.000. 000	3.080.000 .000	100%	14.230.000.000						
2	9	4		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	40,15%	45%	150.000. 000	50%	500.000.00 0	60%	525.000.00 0	60%	625.000.0 00	60%	650.000.00 0	60%	650.000.0 00	60%	3.100.000.000	Dinas Pangan
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan								517.084. 990.505		583.895.03 0.540		648.645.00 0.263		801.403.8 95.000		755.741.01 8.750		843.279.9 34.061		4.150.049.869. 119	
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah					Indeks Gini	0,3000	0,3000	509.351. 970.124	0,3000	575.841.51 7.744	0,29	639.634.60 0.263	0,29	791.851.7 70.000	0,29	745.385.93 2.500	0,28	832.860.5 38.499	0,28	4.094.926.329. 130	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	66,00	469.892. 970.124	66,50	511.067.51 7.744	67,00	575.270.60 0.263	67,50	658.657.5 20.000	68,00	675.304.52 0.000	68,50	751.106.5 46.000	68,50	3.641.299.674. 131		
				Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20 %		10,70%		11,20 %		11,70 %		12,70%		13,70%					
				Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	79,00		83,00		86,00		90,00		93,00		97,00					
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%		13,00%	21,00 %		23,00 %	25,00%		30,00%	30,00%						
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59		99,64			99,69			99,74			99,84	99,94			
				Rasio rumah layak huni	0.195	0.195		0.196			0.197			0.198			0,199	0,20	0,20		
1	3	2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,10%	7,19%	44.177.0 00.000	13,09%	55.700.000. 000	21,25 %	61.600.000. 000	22,97 %	67.300.00 0.000	24,95%	72.500.000 .000	29,76%	79.570.00 0.000	32,61%	380.847.000.00 0	DPUPR



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	73%	79%		83%		86%		90%		93%		97%		97%			DPUPR
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71%	77%	144.808. 148.260	80%	150.140.45 4.840	83%	164.262.52 0.000	87%	172.462.5 20.000	89%	131.862.52 0.000	94%	167.862.8 46.000	94%	931.399.009.10 0		
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,0%	15,0%	20.467.0 00.000	19,0%	13.100.000. 000	37,0%	16.100.000. 000	38,0%	16.100.00 0.000	39,0%	13.100.000 .000	40,0%	22.100.00 0.000	40,0%	100.967.000.00 0	DPUPR	
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	66 unit	71	43.400.0 00.000	78	54.350.000. 000	85	64.350.000. 000	92	74.350.00 0.000	99	84.350.000 .000	106	94.350.00 0.000	106	415.150.000.00 0	DPUPR	
1	3	10	Program Penyelenggaraa n Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	66	205.064. 020.864	66,5	213.260.17 3.592	67	244.616.19 0.951	67,5	303.300.0 00.000	68	342.300.00 0.000	68,5	350.800.0 00.000	68,5	1.659.340.385. 407	DPUPR	
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0.195	0.195	75.000.0 00	0.196	1.650.000.0 00	0.197	2.050.000.0 00	0.198	1.900.000 .000	0.199	4.500.000. 000	0.200	6.900.000 .000	0,20	17.075.000.000	DISPERKIM	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79%	85%	2.366.80	88%	1.950.000.0 00	91%	1.175.000.0 00	93,86 %	675.000.0 00	97%	675.000.00 0	100%	575.000.0 00	100%	7.416.801.000	DISPERKIM	
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,14%	0,14%	1.000	0,11%	0	0,08%	00	0,05%	00	0,03%	0	0,00%	0	0,00%			
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,11%	90,35 %	410.000. 000	90,90%	450.000.00 0	91,17 %	900.000.00 0	91,45 %	900.000.0 00	91,72%	500.000.00 0	91,72%	500.000.0 00	91,72%	3.660.000.000	DISPERKIM	
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,4	52,0	9.125.00 0.000	61,3	7.650.000.0 00	71,0	7.900.000.0 00	80,7	8.670.000 .000	90,3	9.517.000. 000	100,0	10.448.70 0.000	100,00	53.310.700.000	DISPERKIM	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	1	0	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah				100%	12.816.889. 312	100%	12.316.889. 312	100%	13.000.00 0.000	100%	16.000.000 .000	100%	18.000.00 0.000	100	72.133.778.624	Dinas Pertanahan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah				Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	50	39.459.0	55,00	60,00	64.364.000.	65,00	133.194.2	70,00	70.081.412	75,00	81.753.99	75,00	453.626.654.99			
				Indeks SPBE	1,30	1,3	00.000	1,3	000	1,4	000	1,4	50.000	1,5	.500	1,6	2.499	1,6	9		
2	1	5	2	Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	50	11.429.0 00.000	55	17.299.000. 000	60	14.474.000. 000	65	16.501.00 0.000	70	24.301.000 .000	75	32.101.00 0.000	75	116.105.000.00 0	Dinas Perhubunga n
2	1	5	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	28.030.0 00.000	2	41.675.000. 000	2	40.325.000. 000	2	106.950.0 00.000	2	37.050.000 .000	2	40.755.00 0.000	12	294.785.000.00 0	Dinas Perhubunga n
2	1	6	2	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE		1,3		1,3	5.800.000.0 00	1,4	9.565.000.0 00	1,4	9.743.250 .000	1,5	8.730.412. 500	1,6	8.897.992 .499	1,6	42.736.654.999	DISKOMINF O
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup				Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	416,564	403,90 3	7.733.02 0.381	391,466	8.053.512.7 96	379,1 79	9.010.400.0 00	366,9 98	9.552.125 .000	354,906	10.355.086 .250	342,901	10.419.39 5.562	342,901	55.123.539.989		
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup				Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	7.733.02 0.381	56,39	8.053.512.7 96	56,49	9.010.400.0 00	56,59	9.552.125 .000	56,69	10.355.086 .250	56,79	10.419.39 5.562	56,79	55.123.539.989		
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	85,87	85,97		86,07		86,17		86,27		86,37		86,47					
				Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	89,78	89,79		89,79		89,80		89,80		89,81		89,81					
2	1	1	3	Program Pengendalian	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	2,38	90%	514.506. 735	90%	994.999.15 0	90%	1.071.700.0 00	90%	1.149.025 .000	90%	1.236.886. 250	90%	1.285.395 .562	90%	6.252.512.697	DLHK



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
2	1	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	2,38	90%	74.993.000	90%	74.993.000	90%	78.700.000	90%	82.600.000	90%	86.700.000	90%	91.000.000	90%	488.986.000	DLHK	
2	1	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah	97,58	90%	7.143.520.646	90%	6.983.520.646	90%	7.860.000.000	90%	8.320.500.000	90%	9.031.500.000	90%	9.043.000.000	90%	48.382.041.292	DLHK	
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel									325.325.606.784		358.809.749.829		378.619.185.802		422.762.077.753		508.333.093.763		524.963.940.682		2.512.840.701.517	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN					Indeks Reformasi Birokrasi		B	325.325.606.784	B	358.809.749.829	A	378.619.185.802	A	422.762.077.753	A	508.333.093.763	A	524.963.940.682	A	2.512.840.701.517		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah					Opini BPK	WTP	WTP	317.786.283.288	WTP	346.444.589.364	WTP	355.288.045.194	WTP	400.084.974.616	WTP	481.352.681.816	WTP	497.898.879.917	WTP	2.398.855.454.194		
					Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)		B (65)		B (67)		B (68)		B (70)		BB (72)		BB (72)			
					Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	sangat tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi			
5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	278.340.781.180	WTP	289.932.000.000	WTP	291.022.000.000	WTP	325.624.950.943	WTP	393.053.541.132	WTP	393.294.849.358	WTP	1.971.268.122.613	BPKAD	
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu			Tepat Waktu



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Persentase SILPA terhadap APBD	25,93	21,04		20		20		19		19		18		18		
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		23.821.051.988	BPKAD
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	80%	85%	1.244.340.488	90%	4.145.342.300	95%	4.345.342.300	100%	4.545.342.300	100%	4.695.342.300	100%	4.845.342.300	100%			
				Presentase Aset yang sudah dinilai	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%			
				Presentase Aset yang termanfaatkan	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%			
				Presentase penghapusan aset	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%			
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD dalam APBD	10,01%	10,50 %	2.865.190.548	10,50%	3.724.724.712	11%	4.842.172.026	11%	6.294.823.634	11,5%	8.183.270.724	12%	10.638.251.941	12%	36.548.433.585	BAPENDA	
				Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	2.865.190.548	100%	3.724.724.712	100%	4.842.172.026	100%	6.294.823.634	100%	8.183.270.724	100%	10.638.251.941	100%	36.548.433.585		
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah		1.902.840.108.000	1.952.000.000	1.882.328.900.000	2.147.200.000	1.931.129.900.000	2.361.920.000	2.155.129.900.000	2.598.112.000	2.284.629.900.000	2.857.923.200	2.322.129.900.000	3.143.715.520	2.322.129.900.000	15.060.870.720	BAPENDA	
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	100%	100%	2.649.999.770	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	12.249.999.770	BAPELITBANG	
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	100%	100%	2.509.998.988	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	18.157.498.988	BAPELITBANG	



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													PD Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	1	2	Program Penyelenggara n Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	2.063.15 6.500	80%	5.821.290.1 40	80%	7.567.677.1 82	85%	9.837.980 .337	85%	12.789.374 .438	85%	16.626.18 6.769	85%	54.705.665.365	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase Cakupan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	1.944.17 7.850	80%	4.084.847.2 00	80%	5.310.301.3 60	80%	6.903.391 .768	85%	8.974.409. 298	85%	11.666.73 2.088	85%	38.883.859.564	Inspektorat
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	100	19.801.4 49.316	100	25.664.960. 300	100	27.546.960. 300	100	30.236.05 0.000	100	34.566.050 .000	100	38.696.05 0.000	100	176.511.519.91 6	Sekretariat DPRD
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase Tertatanya Administrasi Umum		80%	1.470.00 0.000											1.470.000.000	Sekretariat daerah	
2	1 3	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	50	79.998.1 00	65	2.150.000.0 00	70	2.400.000.0 00	75	2.700.000 .000	80	3.000.000. 000	90	3.300.000 .000	90	13.629.998.100	DPMK
Meringkat pelayanan penyeleng			nya kualitas publik dan saraan daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	7.539.32 3.496	A (90,12)	12.365.160. 465	A (92,16)	23.331.140. 608	A (94,06)	22.677.10 3.138	A (96,26)	26.980.411 .947	A (98)	27.065.06 0.766	A (98)	113.985.247.32 3	
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN		10	4.114.96 3.912	12	1.978.596.5 00	15	9.276.777.2 06	18	9.004.819 .900	20	10.053.888 .240	25	10.058.88 8.240	25	44.487.933.998	BKPSDM
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM				993 Orang	5.614.506.0 00	993 Orang	6.175.956.6 00	1000 orang	6.793.552 .260	1000 orang	7.472.907. 486	1000 orang	8.220.198 .235	5979 Orang	34.277.120.581	BKPSDM
7	1	2	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup kecamatan			207.000. 000		105.400.00 0		421.395.04 0		430.445.0 40		488.800.04 0		505.074.5 40		1.683.104.160	kecamatan



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan /impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	557.373.000	100%	676.657.965	100%	1.167.011.762	100%	988.285.938	100%	1.114.816.181	100%	1.130.899.751	100%	137.102.000	kecamatan
2	1 3	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa mandiri	800%	9	2.659.986.584	10	3.990.000.000	11	6.290.000.000	12	5.460.000.000	13	7.850.000.000	14	7.150.000.000	15	33.399.986.584	DPMK
				Persentase desa maju	3100%	41		50		54		58		62		71		71		
				Persentase desa berkembang	600%	49		40		35		30		25		15		15		
				Persentase desa tertinggal	100%	1		0		0		0		0		0		0		
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN MISI							1.318.402.825.478		1.646.459.584.275		1.797.748.756.633		2.498.918.991.424		2.095.449.325.621		2.254.218.097.289		11.424.471.691.024	

Sumber Data:RPJMD Kabupaten Berau 2021 -2026



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 pada tabel berikut:

Tabel 1.13

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	
1	2			3	4	5		6		7
Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur							688.145.637.509,00		3.961.761.892.550,00	
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing				Indek Pembangunan Manusia	74.71	77.57	688.145.637.509.00	76.69	3.961.761.892.550.00	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan				Harapan Lama Sekolah	13.32	14.65	269.017.713.238.00	14.83	1.421.965.526.550.00	
				Rata-rata Lama Sekolah	9.52	10.12		10.26		
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75.14	80.44		81.54	1.396.801.007.487.00	Dinas Pendidikan
				Angka partisipasi kasar SD/MI	104.29	109.61		110.71		
				Angka partisipasi kasar SMP/MTS	95.82	100		100		
				Angka Partisipasi Murni SD/MI	95.79	97.77		98.17		
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	76.53	86.17		88.24		
				Angka partisipasi sekolah SD/MI	100.34	105.46		106.51		
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah SMP/MTS	91.85	96.54	264.234.331.988.00	97,5		
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0.02	0		0		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0.03	0		0		
				Angka Kelulusan	-	-		-		



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																2025				Kondisi Akhir Kinerja					
																Target		Rp		Target		Rp			
1				2				3				4				5				6				7	
									Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100		100											
										Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100		100										
										Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105.59	100	100		100										
										Angka melek huruf	99.42	99.6	99.64		99.64										
										Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	82.96	87.11		87.11										
1	1	4		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	4.783.381.250.00	-	25.164.519.063.00	Dinas Pendidikan														
					PAUD	33.13	34.82		35.17																
					SD	76.36	80.26		81.06																
					SMP	94.38	99.19		100																
					Rasio murid/guru sekolah	-	-		-																
					Rasio murid/guru SD Negeri	15	15		15																
					Rasio murid/guru SD Swasta	15.19	15.19		15.19																
					Rasio murid/guru SMP Negeri	13.36	13.36		13.36																
					Rasio murid/guru SMP Swasta	12.76	12.76		12.76																
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	-		-																
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan					Angka Harapan Hidup (Tahun)	72.06	72.6	419.127.924.271.00	72.71	2.539.796.366.000.00															
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN	9.3	99,90%		100%																
					Bidang Kesehatan (%)																				
1	2	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi kurang	7.3	7.8	265.698.795.314.00	7.8	1.736.011.743.359.00	Dinas Kesehatan														
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22	18		18																
					Jumlah kematian ibu melahirkan	8	8		7																



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		Kondisi Akhir Kinerja		
				Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6		7
		Angka kematian anak balita	15	15				
		Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)/ODF	30	98		100		
		Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60	83		85		
		Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam	100	100		100		
		Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)	59	110		85		
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94	95		95		
		presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100	100		100		
		Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87.9	95		95		
		Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79	100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100		100		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0.84	0.45		0.85		
		Angka kejadian Malaria	0	< 1		< 1		
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100		100		
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100		100		
		Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100		100		



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5		6		7
				Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100		100		
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100		100		
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79	100	12.316.713.000,00	100	63.169.179.896,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80	100	100				
			Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103	140					
			Jumlah Tenaga Bidan	303	335					
			Jumlah Tenaga Perawat	584	660					
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100	100	2.297.015.000,00	100	10.622.698.000,00	Dinas Kesehatan



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
																2025		Kondisi Akhir Kinerja						
																Target	Rp	Target	Rp					
1				2				3				4				5		6		7				
					Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan				65,65		82				85									
					Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat				57,14		80				85									
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Cakupan Desa/kelurahan				59		95		1.679.545.000,00			95		8.295.494.500,00		Dinas Kesehatan
					Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)				3,8		55				55									
					Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam (%)				100		100				100									
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten				100		100%		134.927.461.648,00		100%		711.049.567.904,00		RSUD dr. Abdul Rivai	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit (%)				100		100%		727.394.308,00		100%		3.833.270.132,00		RSUD dr. Abdul Rivai	
2	14	4			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 1 519 tahun (ASFR 15-19) 1				19		14 per 1000 kelahiran		1.481.000.000,00		13 per 1000 kelahiran		6.814.412.210,00		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal														143.229.575.599,00				799.819.227.838,00						



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
																2025		Kondisi Akhir Kinerja							
																Target	Rp	Target	Rp						
1				2				3				4				5		6		7					
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing								Laju Pertumbuhan ekonomi				-3,35				5.54		77.437.625.599,00		5.29		422.730.936.972,00			
Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau				Tingkat Pengangguran terbuka				5.08				4.54		6.132.020.000,00		4.41		28.541.513.818,00							
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten (%)				70				75%		1.623.820.000,00		80%		8.142.293.818,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan				20				30%		3.685.400.000,00		35%		16.368.340.000,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				100				100%		822.800.000,00		100%		4.030.880.000,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Menurunnya Angka Kemiskinan				Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan				5.19				5.25		13.200.000.000,00		4.84		58.508.180.150,00							
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani								100%		5.500.000.000,00		100%		19.986.084.750,00		Dinas Sosial					
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi								100%		7.000.000.000,00		100%		35.113.627.600,00		Dinas Sosial					
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial								100%		700.000.000,00		100%		3.408.467.800,00		Dinas Sosial					
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				TAD				150		5.430.000.000,00		160		24.764.998.909,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung					
				Persentase LPM Berprestasi				TAD		100		100													
				Persentase PKK aktif				100		100		100													
				Persentase Posyandu aktif				26.4		100		100													



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		Kondisi Akhir Kinerja		
							Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5		6		7
					Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	30		35		
4	1	2		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	100	100%	2.500.000.000,00	100%	13.598.800.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
					Persentase Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama, mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat	100	100%	34.522.000.000,00	100%	192.098.000.000,00	Bagian Kesra
					Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi & terkoordinir.		97%	2.329.230.000,00	98%	11.454.683.000,00	Bagian Hukum dan Perundang-undangan
7	1	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100%	21.899.375.599,00	100%	121.608.941.245,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/kecamatan
				Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	148.9	210.67	65.791.950.000,00	164.85	377.088.290.866,00	
				Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	Presentase Usaha mikro dan kecil	24	2%	2.820.000.000,00	40%	14.040.000.000,00	
2	17	7		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	45	5%	670.000.000,00	70%	4.110.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	8		Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000	20 UKM	300.000.000,00	25 UKM	1.390.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5		6		7
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250	200 SKA	250.000.000,00	1 220 SKA	1.040.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2	4 Pasar	550.000.000,00	4 pasar	2.750.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12	1 2 Laporan	90.000.000,00	1 2 Laporan	450.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2	0,20%	960.000.000,00	1%	4.300.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		-	23.500.000.000,00	1,03	116.053.734.986,00	
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan (Orang)	1 27396 Orang	259755 Orang	13.300.000.000,00	270355 orang	70.513.736.012,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Lama kunjungan Wisata (Hari)	2	4 Hari		4 Hari		
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	3.600.000.000,00	8 Destinasi Wisata	15.639.999.774,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	30 Orang	120 Orang	2.350.000.000,00	1 50 Orang	11.614.999.800,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2025		Kondisi Akhir Kinerja			
						Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5		6		7	
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	4 Event	7 Event	4.250.000.000,00		7 Event	18.284.999.400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Menigkatnya Produksi Sektor Primer				Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.64	12.01	34.871.950.000,00		12.09	224.704.555.880,00	
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)		2.475.000	1.929.950.000,00		2.520.000	9.556.381.174,00	Dinas Perkebunan
				Kelapa Dalam	3.483	9.471	9.980				
				Kakao	788	1.950	2.100				
				Karet	82	400	515				
				Lada	827	1.455			1.500		
3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Kebun yang dikembangkan		100	2.075.000.000,00		100	9.494.996.760,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	12500	2.580.000.000,00		15000	12.556.283.916,00	Dinas Perkebunan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	25	650.000.000,00		130	3.024.991.800,00	Dinas Perkebunan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan (Klpg Tani)	30	10	1.280.000.000,00		60 Kelompok Tani	6.623.714.800,00	Dinas Perkebunan
				Kelompok Tani							
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) (ton/ha)	3	3,49	12.120.000.000,00		3,62	71.231.398.494,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Produktivitas Jagung (ton/ha)	5	5,95	6				
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit) (ton/ha)	4	4,17	4,25				



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																2025				Kondisi Akhir Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																Target		Rp		Target		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1				2				3				4				5				6				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
																2025		Kondisi Akhir Kinerja					
																Target	Rp	Target	Rp				
1				2				3				4				5		6		7			
								Persentase Penguatan cadangan pangan				50		100%			100%						
2	9	4		Program Penanganan Kerawanan Pangan				Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan				40.15		60%		650.000.000,00		60%		3.100.000.000,00		Dinas Pangan	
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan														755.741.018.750,00				4.150.049.869.119,00					
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah								Indeks Gini				0.3		0.32		745.385.932.500,00		0.28		4.094.926.329.130,00			
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar								Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				65.5		68		675.304.520.000.00		68,5		3.641.299.674.131,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
								Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan				9.7		12,70%				13.70%					
								Capaian Akses Air Minum Layak				73.28		93				97					
								Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				19		25.00%				30.00%					
								Persentase rumah tangga pengguna listrik				99.54		99,84				99.94					
								Rasio rumah layak huni				0.195		0.199				0.2					
1	3	2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				19.1		24,95%		72.500.000.000,00		32.61%		380.847.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	3		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				Persentase penduduk berakses air minum				73		93%		131.862.520.000.00		97%		931.399.009.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
								Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				71		89%				94%					
1	3	5		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				40		39,00%		13.100.000.000,00		40,00%		100.967.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5		6		7
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	66	99	84.350.000.000.00	106	415.150.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	68	342.300.000.000.00	68,5	1.659.340.385.407.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0.195	0.199	4.500.000.000.00	0.2	17.075.000.000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	Progran Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79.33%	96,93%	675.000.000.00	100%	7.416.801.000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	0.14%	0.03%		0,00%		
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	90.11%	91,72%	500.000.000.00	90,72%	3.660.000.000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	46,43%	90.33%	9.517.000.000.00	100%	53.310.700.000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah		100%	16.000.000.000.00	100	72.133.778.624.00	Dinas Pertanahan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah				Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	70	70.081.412.500.00	75	453.626.654.999.00	



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
																2025		Kondisi Akhir Kinerja					
																Target	Rp	Target	Rp				
1				2				3				4				5		6		7			
								Indeks SPBE				1.3				1.5				1.6			
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten				39				70		24.301.000.000,00		75		116.105.000.000,00		Dinas Perhubungan			
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun				57				2		37.050.000.000,00		12		294.785.000.000,00		Dinas Perhubungan			
2	16	2	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE								1.5		8.730.412.500,00		1.6		42.736.654.999,00		Dinas Komunikasi dan Informasi			
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup				Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca				416.564				354.906		10.355.086.250,00		342.901		55.123.539.989,00					
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup				Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air				56.19				56.69		10.355.086.250,00		56.79		55.123.539.989,00					
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan				85.87				86.37				86.47							
				Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara				89.78				89.81				89.81							
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup (%)				2.38				90%		1.236.886.250,00		90%		6.252.512.697,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani (%)				2.38				90%		86.700.000,00		90%		488.986.000,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah (%)				97.58				90%		9.031.500.000,00		90%		48.382.041.292,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel														508.333.093.763,00				2.512.840.701.517,00					



Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)				Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
																2025						Kondisi Akhir Kinerja			
																Target		Rp				Target		Rp	
1				2				3				4				5				6				7	
				Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN				Indeks Reformasi Birokrasi								A		508.333.093.763.00		A		2.512.840.701.517.00		Bagian Ortal	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Opini BPK				WTP		WTP		481.352.681.816.00		WTP		2.398.855.454.194.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
								Nilai/Predikat AKIP				B (63.50)		B (70)				BB (72)							
								Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau				Sangat Tinggi		Tinggi				Tinggi							
5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Opini BPK terhadap laporan keuangan				WTP		WTP		393.053.541.132.00		WTP		1.971.268.122.613.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
				Penetapan APBD				Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu													
				Persentase SILPA terhadap APBD				25.93		19		18													
5	2	3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				Presentase Aset yang terdata dengan baik				80		100%		4.695.342.300.00		100%		23.821.051.988.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik				80		100%		100%													
				Presentase Aset yang sudah dinilai				65		95%		100%													
				Presentase Aset yang termanfaatkan				65		95%		100%													
				Presentase penghapusan aset				65		95%		100%													
5	2	4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				Kontribusi PAD dalam APBD (%)				100		11.50%		8.183.270.724.00		12%		36.548.433.585.00		Badan Pendapatan Daerah			
				Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi				100		100%		8.183.270.724.00		100%		36.548.433.585.00									
5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Terkelolanya Keuangan Daerah				-		2.284.62		2.857.923.200.00		2.322.12		15.060.870.720.00		Badan Pendapatan Daerah			
												9.900.000		9.900.000											



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5		6		7
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	100	100%	1.920.000.000,00	100%	12.249.999.770,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan (%)	100	100%	3.129.500.000,00	100%	18.157.498.988,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80	85%	12.789.374.438,00	85%	54.705.665.365,00	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	Presentase Cakupan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	80	85%	8.974.409.298,00	85%	38.883.859.564,00	Inspektorat
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90	100	34.566.050.000,00	100	176.511.519.916,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase Tertatanya Administrasi Umum		85	1.663.750.000,00	85	1.830.125.000,00	Bagian Umum
2	13	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	50	80	3.000.000.000,00	90	13.629.998.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah			Indek Kepuasan Masyarakat		A (89,36)	A (96,26)	26.980.411.947,00	A (98)	113.985.247.323,00	Bagian Organisasi
	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN		20	10.053.888.240,00	25	44.487.933.998,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2025		Kondisi Akhir Kinerja		
												Target	Rp	Target	Rp	
1			2			3			4			5		6		7
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM						1000 orang	7.472.907.486.00		5979 orang	34.277.120.581.00		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup kecamatan (%)							488.800.040.00			1.683.104.160.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kecamatan
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)			100			100%	1.114.816.181.00		100%	137.102.000.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kecamatan
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa mandiri			800			13	7.850.000.000.00		14	33.399.986.584.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase desa maju			3100			62			71			
				Persentase desa berkembang			600			25			15			
				Persentase desa tertinggal			100			0			0			
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN MISI											2.095.449.325.621			11.424.471.691.024.00		

Sumber : RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025



1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat, semua aspek/sektor dalam urusan wajib yang dikategorikan sebagai pelayanan dasar harus disusun standar pelayanan minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu yang dijadikan sebagai acuan standar kualitas dan kuantitas pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara meliputi kebutuhan pemenuhan atas barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Adapun Jenis Pelayanan Dasar SPM adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Ketentuan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu urusan wajib pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan menurut peraturan pemerintah Pasal 2 tahun 2018 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;



7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.



Penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian dijabarkan secara teknis oleh masing masing Kementerian Lembaga yang menangani Urusan wajib pelayanan dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2025, telah menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Berau melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 292 Tahun 2025 Tentang Penetapan Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Berau Tahun 2025, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 420 Tahun 2025 Tentang perubahan atas keputusan Bupati Berau Nomor 292 Tahun 2025 Tentang Penetapan Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Berau Tahun 2025. Penetapan Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan dalam penerapan SPM di kabupaten Berau dan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.4/2851/ST Tentang Penetapan Target Jumlah Warga negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Berikut Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Berau Tahun 2025 :



Tabel 1.14
Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Berau Tahun 2025

NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
A	DINAS PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	9.410	9.410	8.425
		Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan		Persentase	100	100	81.22
		1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	41.03	41.03	45.10
		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	52.89	52.89	61.00
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	47.052	47.052	46.305
		Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan		Persentase	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan		Persentase	100	100	100
		SD					
		1	Kemampuan literasi	Nilai	64.18	64.18	56.61
		2	Kemampuan numerasi	Nilai	53.45	53.45	50.09
		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.51	70.51	71.03
		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.89	71.89	69.18
		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53.27	53.27	56.96
		SMP					
		1	Kemampuan literasi	Nilai	75.71	75.71	71.45
		2	Kemampuan numerasi	Nilai	62.25	62.25	62.64



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	69.65	69.65	72.23
		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.89	71.89	71.22
		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.67	55.67	59.60
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	1.100	1.100	1.096
		1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	100	100
B	DINAS KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	4.941	4.941	4.891
		1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4.941	4.941	4.891
		2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	30.500	30.500	30.500
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	4.941	4.941	4.891
		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	21	21	21
		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	21	21	21
		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	21	21	21
		7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	21	21	21
		8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4.941	4.941	4.891
		9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4.941	4.941	4.891
		10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	21



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	64	64	64
		12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	5	5	5
		13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	53	53	53
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	35	35	35
		17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	4.941	4.941	4.891
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	4.891	4.891	4.891
		1	Formulir partograf	Formulir	10.000	10.000	10.000
		2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4.891	4.891	4.891
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	4.891	4.891	4.891
		4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	21
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	5	5	5
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	53	53	53



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	35	35	35
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	4.615	4.615	4.615
		1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin	4.615	4.615	4.615
		2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	1.200	1.200	1.200
		3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	1.800	1.800	1.800
		4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	4.615	4.615	4.615
		5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	4.615	4.615	4.615
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4.615	4.615	4.615
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	21
		8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3	3	3
		9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	53
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	53	53	53
		13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	35
		14	Kader Kesehatan	Orang	2.423	2.423	2.423
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	18.396	18.396	18.396
		1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	18.396	18.396	18.396
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	18.396	18.396	18.396



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	18.396	18.396	18.396
		4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	<i>Kapsul</i>	1.100	1.100	1.100
		5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Kapsul</i>	23.600	23.600	23.600
		6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>	666	666	666
		7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	<i>Vaksin</i>	1.000	1.000	1.000
		8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	<i>Vaksin</i>	900	900	900
		9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	<i>Vaksin</i>	570	570	570
		10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	<i>Vaksin</i>	570	570	570
		11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	<i>Vaksin</i>	570	570	570
		12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	<i>Vaksin</i>	570	570	570
		13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	<i>Unit</i>	21	21	21
		14	Peralatan Anafilaktik	<i>Paket</i>	21	21	21
		15	Formula terapi gizi buruk	<i>Paket</i>	2.100	2.100	2.100
		16	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	52	52	52
		17	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	302	302	302
		18	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	415	415	415
		19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	35	35	35
		20	Guru PAUD	<i>Orang</i>	229	229	229
		21	Kader kesehatan	<i>Orang</i>	2.423	2.423	2.423



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	38.299	38.299	38.299
		1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	38.299	38.299	38.299
		2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	38.299	38.299	38.299
		3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	38.299	38.299	38.299
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	38.299	38.299	38.299
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	38.299	38.299	38.299
		6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/KABUPATEN)	Tablet	30.500	30.500	30.500



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	21	21	21
		8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	354	354	354
		9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	21	21	21
		10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	2.434	2.434	2.434
		11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	17	17	17
		12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	35
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	53
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	86
		17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0
		18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	2.423	2.423	2.423



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	178.990	178.990	178.990
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	21
		2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	21	21	21
		3	Alat : Tensimeter	Unit	21	21	21
		4	Alat : Glukometer	Unit	21	21	21
		5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	21	21	21
		6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	21	21	21
		7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	21	21	21
		8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	21	21	21
		9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	0	0	0
		10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	21	21	21
		11	Alat Pelayanan KB	Unit	3	3	3
			a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	1	1	1
			b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	1	1	1
			c. Vasektomi set	Unit	1	1	1
		12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	21	21	21



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>	448	448	448
		14	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	52	52	52
		15	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	302	302	302
		16	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	415	415	415
		17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	35	35	35
		18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	86	86	86
		19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	2.423	2.423	2.423
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	20.307	20.307	20.307
		1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	<i>Paket</i>	21	21	21
		2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	<i>Paket</i>	21	21	21
		3	Alat pemeriksaan kolesterol	<i>Paket</i>	21	21	21
		4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	<i>Paket</i>	21	21	21
		5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	<i>Paket</i>	6.829	6.829	3.829
		6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	<i>Buku</i>	20.307	20.307	20.307
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	21	21	21
		8	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	52	52	52
		9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	302	302	302



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	35
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	86
		13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2.423	2.423	2.423
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	17.362	17.362	17.362
		1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	21	21	21
		2	Obat Hipertensi	Paket	530.000	530.000	530.000
		3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	21	21	21
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	21	21	21
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	52
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	35
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	53	53	53



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	53
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	86
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	4.493	4.493	4.493
		1	Obat Diabetes Melitus	Paket	290.000	290.000	290.000
		2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	21	21	21
		3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21	21	21
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	21	21	21
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	52
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	53
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	86



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	35
		12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47	47	47
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	230	230	230
		1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	21	21	21
		2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	400	400	400
		3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2.500	2.500	2.500
		4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	21
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	52



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	20	20	20
		8	Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0
		9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	6	6	6
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	7.247	7.247	7.247
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	21
		2	Reagen Zn TB	Kit	50	50	50
		3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	7.247	7.247	7.247
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	7.247	7.247	7.247
		5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	200	200	200
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	21	21	21
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21	21	21
		8	Tuberkulin	Vial	0	0	0
		9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	4	4	4
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	786	786	786
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	212	212	212
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	86
		13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47	47	47



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	14	14	14
		15	Kader Kesehatan	Orang	2.423	2.423	2.423
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	6.864	6.864	6.864
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	21
		2	Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDT) pertama	Tes	6.864	6.864	6.864
		3	Bahan Medis Habis Pakai. Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6.864	6.864	6.864
		4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6.864	6.864	6.864
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	6	6	6
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	302
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	415
		8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	47	47	47
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	86	86	86
		10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
C	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	7.358	4.951	7.358
			Jaringan Perpipaaan				
			Kuantitas SPAM				
		1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1.551	1.016	1.551
			Kualitas SPAM				
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1.551	1.016	1.315
			Bukan Jaringan Perpipaan				
			Kuantitas SPAM				
		1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a
			Kualitas SPAM				
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	1.218	1.218	1.218



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		1	SPALD Kabupaten/KABUPATEN				
			KUANTITAS SPALD				
			a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	250	250	250
			KUALITAS SPALD				
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
			a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)				
			b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perKABUPATEN dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a
			c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan	Rumah Tangga	250	250	250



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar</i>				
D	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	n/a	n/a	n/a
		Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat					
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)					
		1	<i>Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)</i>	<i>form tahapan</i>	n/a	n/a	n/a
		2	<i>Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	n/a	n/a	n/a



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Ada Relokasi Program Pemerintah					
		1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		n/a	n/a	n/a
			a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
			b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
			c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
		2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
		Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah					
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan			
			a. Pendataan		76	76	76
			b. Perhitungan Kebutuhan Pembangunan Rumah		76	76	76
			c. Perencanaan		76	76	n/a
E.1	SATPOL PP						



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	10	10	10
		1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	unit	3	3	3
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	dokumen	7	7	7
		3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</i>	orang	53	50	53



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material <i>(berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal</i>	<i>dokumen</i>			
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil <i>(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)</i>	<i>orang</i>	5	5	5
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan <i>(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)</i>	<i>orang</i>	5	5	5
E.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	11.064	11.064	11.064
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana <i>(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)</i>				
			Tidak ada				
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1
			b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1
		2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
			1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
			a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	500	500	120
			b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	5	5	3
			c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	3
			d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	10
			2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
			a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	6	6	6
			b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	6	6	6
			c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	5
			d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	2
			e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	6



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
			a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	36	36	0
			b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	15	15	0
			c. Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan	orang	0	0	0
			d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0
			e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	11.064	11.064	11.064
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
			Tidak Ada				
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	1
			b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	1
		2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
			a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	0	2
			c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	0	4
			d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	0	4



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi				
			1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
			a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	1	1	1
			b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	1	1	6
			c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>	6	6	6
			d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	1	1	3
			e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	5	5	8
			f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	5	5	2
			2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
			a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	1	1	0
			b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	0	0	0
			c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>	0	0	0
			d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	4	4	0
			e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>	3	3	0
		4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			1) Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)				
			a. Tersedianya Dokumen Latihan tabel top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>	1	1	0
			b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/tabel top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>	3	3	0



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/tabel top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	5	5	0
			2) Gladi Lapang				
			<i>a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	2	1	2
			<i>b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	12	1	12
			<i>c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	6	5	6
		5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			<i>a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)</i>	<i>hari</i>	150	150	0
			<i>b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>pertemuan</i>	0	0	0
			<i>c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)</i>	<i>orang</i>	0	0	0
			<i>d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	1	1	0
			<i>e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	0	0	0
			2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
			<i>a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	1	1	0
			<i>b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	0	0	0



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	0	0	0
			<i>d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga PUSDALOPS (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	0	0	0
			3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
			<i>a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	1	1	0
			<i>b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	0	0	0
			4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				
			<i>a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	1	1	0
			<i>b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	50	50	0
		6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			<i>a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	10	10	0
			<i>b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	0	0	0
			<i>c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	0	0	0
			<i>d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	11	11	0



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	11.064	11.064	11.064
		Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
		Kejadian Bencana				
		1	Respon Cepat Darurat Bencana			
		a. Tersusunya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	2		2
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	37		37
		2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	55	50	55
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	1	2
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	0	3
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	25	1	25
		e. Tersusunya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	4	1	4
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	21	21	21



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	1	0	1
			<i>h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	10	10	10
			Status Tanggap Darurat				
		1	Respon Cepat Darurat Bencana				
			<i>a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>dokumen</i>	0	0	0
			<i>b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>dokumen</i>	0	0	0
			<i>c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>orang</i>	0	0	0
		2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				
			<i>a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	0	0	0
			<i>b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	0	0	0
			<i>c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	0	0	0
			<i>d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	0	0	0



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0
		3)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
			a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	55	50	55
			b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	1	2
			c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	0	3
			d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	25	1	25
			e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	4	1	4
			f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	21	21	21
			g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	1
			h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	10
		Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM					



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
E.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	3.200	3.200	3.200
		1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi <i>(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)</i>	<i>layanan</i>	<i>30</i>	15	<i>30</i>
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi <i>(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)</i>	<i>dokumen</i>	3	3	<i>3</i>
		3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran <i>(pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)</i>	<i>unit</i>	<i>110</i>	20	<i>110</i>
		4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia <i>(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)</i>	<i>orang</i>	<i>27</i>	5	<i>27</i>



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	37	0	37
		6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	37	0	37
G	DINAS SOSIAL						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	10	6	10
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	10	6	10
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan	Orang	10	6	10



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar</i>				
		3	Penyediaan permakanan <i>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</i>	Orang	10	6	10
		4	Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	Orang	10	6	10
		5	Penyediaan alat bantu <i>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)</i>	Orang	10	5	10
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan <i>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>	Orang	10	5	10
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial <i>(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat</i>	Orang	10	5	10



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>tulis lainnya)</i> <i>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,</i> <i>bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,</i> <i>bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>				
		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar <i>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</i>	Orang	10	6	10
		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	6	10
		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar <i>(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)</i>	Orang	10	6	10
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga <i>(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)</i>	Orang	10	6	10



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	5	10
		13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	6	10
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	20	15	20
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	20	15	20
20		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	15	20
		3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga	Orang	20	15	20



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</i>				
		4	Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	Orang	20	15	15
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan <i>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>	Orang	20	15	15
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial <i>(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)</i> <i>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>	Orang	20	15	20



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	9	10
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	5	10
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	9	10
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	10
10		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	15	15	10
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	8	8
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	15	15	5



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		1	Layanan data dan pengaduan <i>layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</i>	Orang	15	15	5
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat <i>layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar</i>	Orang	15	15	5
		3	Penyediaan permakanan <i>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</i>	Orang	15	15	5
		4	Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	Orang	15	15	5
		5	Penyediaan alat bantu <i>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk,</i>	Orang	15	15	5



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)</i>				
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	5
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	15	15	5
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	6	6	5



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	5
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	15	15	5
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang	15	15	5
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	15	15	5
		13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	7	7	3
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	10	10	5
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang	Orang	10	10	5



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</i>				
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	<i>Orang</i>	5	5	5
		3	Penyediaan permakanaan <i>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)</i>	<i>Orang</i>	10	10	5
		4	Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	<i>Orang</i>	10	10	5
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan <i>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>Orang</i>	10	10	5
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial <i>(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat</i>	<i>Orang</i>	10	10	5



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>tulis lainnya)</i> <i>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,</i> <i>bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,</i> <i>bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>				
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	10	5
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	4	5
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5	5	3
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	5



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	5
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	3
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/KABUPATEN	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	200	200	200
		<i>Ya Terjadi Bencana</i>					
		1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	200	200	200
		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200	200



NO	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	30	30	15
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	15	15	10
		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	15	15	15



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun Anggaran 2025, Capaian Kinerja Makro pada Kabupaten Berau dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro pada Kabupaten Berau TA. 2025

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA 2025	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	77.17	77.72	0.71
2	Presentase penduduk Miskin	Laju Presentase penduduk Miskin	5.08	4.44	-12.60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Laju Tingkat Pengangguran Terbuka	5.15	4.40	-14.56
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7.28	2.48	-65.93
5	PDRB Per- Kapita ADHB	Laju PDRB Per- Kapita ADHB	194.08	193.39	-0.36
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Ketimpangan Pendapatan	0.317	0.294	-7.26

Sumber Data : BPS Kabupaten Berau



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kemudian di jabarkan dalam Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tanggal 27 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Dirjen OTDA No : 100.2.7/989/OTDA Tanggal 12 Februari 2026 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)

No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	9.399,00	12.399,00	75,80	%	Dinas Pendidikan Disdukcapil
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	53.454,00	53.819,00	99,32	%	Dinas Pendidikan Disdukcapil
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	725,00	2.224,00	32,60	%	Dinas Pendidikan Disdukcapil



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	559,00	957,00	58,41	%	Dinas Pendidikan
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	1.274,00	2.132,00	59,76	%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	3,00	4.535,00	0,07	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi	12.600,00	17.362,00	72,57	%	Dinas kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama					
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	3.838.00	4.493.00	85.42	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	230.00	230.00	100.00	%	Dinas kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			dalam kurun waktu satu tahun						
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	7.247,00	7.247,00	100,00	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6.864,00	6.864,00	100,00	%	Dinas kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	1.853,00	9.315,00	19,89	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.987,00	4.891,00	81,52	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.535,00	4.891,00	92,72	%	Dinas kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun						
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.943,00	4.615,00	85,44	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	14.276,00	18.396,00	77,60	%	Dinas kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			mendapatkan pelayanan sesuai standar 3						
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	36.633,00	38.299,00	95,65	%	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	72.957,00	178.990,00	40,76	%	Dinas kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			kurun waktu satu tahun						
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	12.793,00	20.307,00	63,00	%	Dinas kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	350,00	1.278,00	27,39	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	29,00	29,00	100,00	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota							
		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	554.22	1.433.51	38.66	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	247.466.00	308.020.00	80.34	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota							
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	54.222,00	63.945,00	84,79	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)		1,00		%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1,00	1,00	100,00	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	52,00	52,00	100,00	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1,00	1,00	100,00	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	367,00	367,00	100,00	%	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota	1,00	1,00	100,00	%	Dinas perumahan Rakyat dan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		memperoleh rumah layak huni	penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	yang akan ditangani pada tahun N					Kawasan permukiman
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	1.27	1.27	100.00	%	Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	233.00	4.056.00	5.74	%	Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	2.00	2.00	100.00	%	Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
5	Ketentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3,00	3,00	100,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	40,00	40,00	100,00	%	Satpol PP
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	2,00	2,00	100,00	%	Satpol PP



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	211.008,00	280.998,00	75,09	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	11.785,00	11.785,00	100,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	49,00	49,00	100,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan	10,00	10,00	100,00	%	Dinas Sosial



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		kebutuhan dasarnya di luar panti	terpenuhi kebutuhan dasarnya	rehabilitasi sosial dasar di luar panti					
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	20,00	20,00	100,00	-	Dinas Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	5,00	5,00	100,00	-	Dinas Sosial
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1,00	1,00	100,00	-	Dinas Sosial



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	1.322,00	1.322,00	100,00	-	Dinas Sosial
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	12.287,00	12.287,00	100,00	-	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	1,00	1,00	100,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	269,00	269,00	100,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan	4.465,00	4.465,00	100,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
			dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	66,00	66,00	100,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	9,00	9,00	100,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
									Perlindungan Anak
9	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	46.60	73.12	63.73	%	Dinas Pangan
10	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	4.006.123,00	36.162.394,41	11,08	%	Dinas Pertanahan, BPKAD
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	22.233.913.418,00	36.962.366.732,00	60,15	%	Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		dengan Rencana Tata Ruang Wilayah							Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1,00	15,00	6,67	%	Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	18,00	27,00	66,67	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		(PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota							
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	44.575,00	56.213,65	79,30	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	98.950,00	99.077,00	99,87	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	83.486,00	94.702,00	88,16	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2,00	2,00	100,00	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	211.713,00	213.319,00	99,25	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	12.531,00	12.531,00	100,00	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	558,00	558,00	100,00	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan	83,00	83,00	100,00	%	Dinas kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
				(perceraian) yang tercatat dan melaporkan					
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	100,00	100,00	100,00	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	9,00	39,00	23,08	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	6,00	6,00	100,00	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,22	2,19	101,37	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	29.488,00	43.444,00	67,88	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	4,00	6,00	66,67	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-	0,35	-	0,35	Rasio	Dinas Perhubungan
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,68	-	0,68	Rasio	Dinas Perhubungan
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	-	1,00	-	%	Dinas Perhubungan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	81.00	117.00	69.23	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	12.00	12.00	100.00	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	Jumlah penduduk	208.161.00	208.161.00	100.00	%	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	pemerintah daerah kabupaten/kota						
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	166.647.499.662,00	123.996.718.735,00	34,40	%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	6.285,00	15.887,00	39,56	%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	8.764.256.030.244,00	3.746.045.195.708,00	133,96	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	8.764.256.030.244,00	4.500.000.000.000,00	194,76	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Pemuda dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	60,00	50,00	120,00	%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	3.052,00	82.956,00	3,68	%	Dinas Pemuda dan Olahraga



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah. Induk Cabang Olahraga)	168,00	1.068,00	15,73	%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	29,00	61,00	47,54	%	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	684,00	939,00	72,84	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	408,00	918,00	44,44	%	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		sandi Pemerintah Daerah							
22	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	28,00	28,00	100,00	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	6.233,00	9.707,00	- 35,79	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	57,65	-	57,65	Nilai	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
		Indeks Pembangunan	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) +$	-	9,39	-	9,39	Nilai	Dinas Perpustakaan dan kearsipan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Literasi Masyarakat (IPLM)	$(0,70 \times \text{Dimensi Kinerja}) \times 100$						
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	75,83	-	75,83	%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
25	Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	30.196,71	28.813,14	104,80	%	Dinas Perikanan
		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	38,40	-	38,40	Kg / Kap / Tahun	Dinas Perikanan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
26	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	29.136.722.721,00	8.764.256.030.244,00	0,33	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	5.351,00	4.294,00	24,62	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	788.747,00	552.920,00	42,65	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	20.872,70	30.502,30	- 31,57	%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	4.161,98	7.718,11	- 46,08	%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	5.044,01	4.671,08	7,98	%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	1,00	1,00	100,00	%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
28	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan	560,00	1.273,00	43,99	%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		tera sah yang berlaku		tera ulang di wilayah kab/kota					
29	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan					%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota							
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	87,00	867,00	10,03	%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



No	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Sistem Informasi Industri Nasional							
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	867,00	787,00	10,17	%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	4.460.128.737.165,00	8.764.256.030.244,00	50,89	%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17,00	17,00	100,00	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan khusus profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	51.956.823.057,50	.041.361.617.000,00	12,45	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah



No	Fungsi Penunjang	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya							
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	24.354.164.390,18	.076.692.596.726,18	6,39	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	.029.157.751.363,72	.477.482.299.028,18	73,56	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
		Persentase alokasi belanja	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja	.637.996.868.182,87	.577.375.961.000,00	65,23	%	Badan Pengelolaan



No	Fungsi Penunjang	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		infrastruktur pelayanan publik		bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa					Keuangan dan Aset daerah
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.299,00	3.726,00	61,70	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	20,00	20,00	100,00	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5,00	-	5,00	Nilai	Inspektorat Daerah



No	Fungsi Penunjang	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5,00	-	5,00	Nilai	Inspektorat Daerah
		Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	5,00	-	5,00	Nilai	Inspektorat Daerah
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	36,00	39,00	92,31	%	Inspektorat Daerah
6	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40,00	-	40,00	Poin	Sekretariat Daerah
		Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	21,53	-	21,53	Poin	Sekretariat Daerah
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	18,46	-	18,46	Poin	Sekretariat Daerah



No	Fungsi Penunjang	INDIKATOR Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
		Barang/Jasa (SDM PBJ)							
7	Hubungan Dengan DPRD	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1.00	-	1.00	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	8.00	13.00	61,54	%	Sekretariat Daerah
8	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	90.63	-	90.63	Nilai	Sekretariat Daerah



2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai, keluaran (*output*) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5

Target kinerja dalam perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14,65
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	10,12
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72,6
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	99,9
3	Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,51
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4,9
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1,01



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9	Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	12.01
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	84,1
9	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	68
		12	Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	12,7
		13	Capaian akses air minum layak	Persentase	93
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	25
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,84
		16	Rasio rumah layak huni	Persentase	0,1999
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	0,7
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,5
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	74,14
		20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,76
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	95,05
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	70
		24	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Berau	Status	Tinggi
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/nilai	96,26



b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.6

Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14.65	13.44	91.74%
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	10.12	9.58	94.66%
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72.60	75.28	103.69%
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	99.90	100	100%
3	Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4.51	4.40	102.44%
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4.90	4.44	109.39%
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2.00	2.06	103%
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1.01	2.32	229.70%
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9	Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	12.01	13.47	112.16%
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10	Skor pola pangan harapan	Skor	84.1	84.99	101.06%
9	Meningkatnya kualitas pembangunan	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	68	38.66	56.85%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	infrastruktur layanan dasar	12	Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	12,70	81,46	641,42%
		13	Capaian akses air minum layak	Persentase	93	82,93	89,17%
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	25	24,65	98,60%
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,84	Provinsi	Provinsi
		16	Rasio rumah layak huni	Persentase	0,1999	0,207	104,02%
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	0,7	0,625	89,29%
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,5	2,48	165,33%
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	74,14	72,63	97,96%
		20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,76	87,63	105,88%
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	95,05	95,26	100,22%
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP**	100%
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	70	63,58	90,83%
		24	Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Berau	Status	Tinggi	3,4608*	100%
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/nilai	96,26	86,33	89,68%



c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan”.

Pendidikan merupakan yang terpenting yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitas dan layanan pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang mantap dan berkualitas.

Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Berau. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan” dengan 2 (dua) indikator kinerja rata-rata mencapai 93,2% dan termasuk predikat “**Baik**”.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,65	13,44	91,74%
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	10,12	9,58	94,66%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Harapan Lama Sekolah	%	13,36	13,37	13,44
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,56	9,57	9,58

2. Sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan”.

Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat



kesehatan dan makanan dan minuman. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2025 yaitu berjumlah 2.945.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Kesehatan” rata-rata capaian 102% dan termasuk predikat **“Baik Sekali”**.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Angka harapan hidup	%	72,60	75,28	103,69%
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	99,90	100	100,10%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
3	Angka harapan hidup	%	73,45	73,66	75,28
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	100	100

3. Sasaran “menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau”

Sasaran menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau masih menjadi perhatian khusus dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan pengangguran pada suatu wilayah tidak hanya berdampak lemah perekonomian melainkan juga masalah sosial. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau” mencapai 85,81 persen dan termasuk predikat **“Baik”**.

**Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,51	4,40	102,44%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,95	5,15	4,40

4. Sasaran “menurunnya angka kemiskinan”

Keberhasilan suatu pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu perekonomian bagi masyarakat dapat dilihat dari indikator kemiskinan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator kemiskinan Kabupaten Berau 2022-2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan	624.948	677.819	731.250	753.416
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	13.31	13.26	12.35	10.96
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,65	5,54	5,08	4,44
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,98	0,16	0,41	0,55
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,01	0,07	0,11

Sumber: Dinas Sosial Desember 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4.90	4,44	109,39%

**Perbandingan Realisasi Kinerja**

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5.54	5.08	4.44

5. Sasaran “meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)”

Jumlah UMKM di Kabupaten Berau Tahun 2025 Usaha Mikro tercatat sebanyak 25.630 unit, Usaha Kecil berjumlah 286 unit, sedangkan usaha menengah 27 unit yang termasuk dalam 13 kecamatan.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian
7	Persentase Usaha mikro dan kecil	%	2,00%	2,06%	103%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
7	Persentase Usaha mikro dan kecil	%	1.04	3.50	2.06

6. Sasaran “terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism*”**Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,01	2,32	229,70%

**Perbandingan Realisasi Kinerja**

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1.38	2.02	2.32

7. Sasaran “meningkatnya produksi sektor primer”

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan target 12,01 dapat terealisasi sebesar 13,47% dengan tingkat capaian adalah 112%. Produksi pertanian meliputi padi (padi sawah dan ladang), produktivitas jagung dan produktivitas cabai (besar, keriting dan rawit).

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	12.01	13.47	112.16%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11.26	12.42	13.47

8. Sasaran “meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi panga”**Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Capaian
10	Score pola pangan harapan	score	84.1	84.99	101.06%

**Perbandingan Realisasi Kinerja**

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
10	Score pola pangan harapan	score	86.9	85.7	84.99

9. Sasaran “meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan 6 (enam) indikator.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	68	38,66	56,85%
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	12,70	81,46	641,42%
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	93	82,93	89,17%
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	25	24,65	98,60%
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,84	Provinsi	Provinsi
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,1999	0,207	104,02%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67,05	69,97	38,66
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	79,84	81,49	81,46
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	81,70	83,17	82,93
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	73,61	32,97	24,65
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,99	99,60	Provinsi
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,2	0,207	0,207



10. Sasaran “meningkatnya konektivitas antar wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah” dengan 2 (dua) indikator rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten dan indeks SPBE.

Rasio konektivitas antar wilayah kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada saat penginputan target dalam perencanaan ada kesalahan *inputan* data yaitu sebesar 70 yang seharusnya target 0,7. Sedangkan indikator SPBE dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0.7	0,625	89,29%
18	Indeks SPBE	Indeks	1.5	2.48	165,33%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0.75	0.6	0.625
18	Indeks SPBE	indeks	2.02	2.28	2.48

11. Sasaran “eningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator. Adapun target IKLH dan masing-masing indikator (IKA, IKU, IKL dan IKAL) mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi se-Indonesia.



Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	74.14	69.38	122%
20	Hasil pengukuran indkes kualitas udara	Indeks	82.76	83.13	96%
21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	95.05	94.06	105%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	53.33	59.96	69.38
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	85.17	91.61	83.13
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	93.76	94.85	94.06

12. Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP**	100
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	70	63.58	90.83%
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau	Status	Tinggi (3,41)	3.4608*	101.49%

*realisasi 2023

**realisasi 2024



Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
22	Opini BPK	Opini	WTP*	WTP**	100*
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	62.40	62.74	63.58
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau	Status	3,1964	3,1964*	3,4608*

*realisasi 2023

**realisasi 2024

13. Sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah”

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	96,26	86,33	90%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	92,16	85	86,33



d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.

1. Sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14.83	13,44	90,63%
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	10.26	9,58	93,37%

2. Sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan”.

Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
3	Angka harapan hidup	%	72.71	75.28	103%
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	100	100%

3. Sasaran “menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.41	4.40	100.23%



4. Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4.84	4.44	108%

5. Sasaran “meningkatnya Industri Kecil Dan Menengah (IKM)”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
7	Persentase Usaha mikro dan kecil	%	4	2.06	51%

6. Sasaran “terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis *sustainable tourism*”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1.03	2.32	225,24%



7. Sasaran “meningkatnya produksi sektor primer”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	12,09	13,47	111,41%

8. Sasaran “meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
10	Score pola pangan harapan	score	85,1	84,99	99,87%

9. Sasaran “meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	68,50	38,66	56,43%
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	13,70	81,46	595%
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	97	82,93	85,5%



14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	33	24.65	75%
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99.94	Provinsi	
16	Rasio rumah layak huni	persen	0.2	0.207	104%

10. Sasaran “meningkatnya konektivitas antar wilayah”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0.75	0.625	83.33%
18	Indeks SPBE	indeks	1.6	2.48	155%

11. Sasaran “meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56.69	69.38	122%
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86.47	83.13	96%
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	89.814	94.06	105%



12. Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100%
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	72	63,58	88,30%
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau	Status	Tinggi (3,41)	3,4608*	101,49%

*realisasi 2023

**realisasi 2024

13. Sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah”

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	98	86,33	88%

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait efesiensi anggaran dengan capaian kinerja yang telah ditargetkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025.



Tabel 2.48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	2025		Tingkat Efisiensi	OPD
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		Penanggung jawab
1	Harapan lama sekolah	92	87.98%	4%	Dinas Pendidikan
2	Rata-rata lama sekolah	95	85.19%	9%	
3	Angka harapan hidup	104	86.86%	17%	Dinas Kesehatan
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	100	97.00%	3%	
5	Tingkat Pengangguran terbuka	91	102.44%	110.44%	Disnakertrans
6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	109	84.52%	24.48%	Dinas Sosial
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	103	85.21%	18%	Diskoperindag
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	200	85.98%	114.02%	Disbudpar
9	Kontribusi Sektor Pertanian,	112.16	87.13%	25.03%	Dinas Perkebunan
					Dinas perikanan
					DTPHP
10	Score pola pangan harapan	101	84.77%	16.23%	Dinas Pangan
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57	98.35%	-41.53%	DPUPR
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	641	96.76%	544.24%	
13	Capaian Akses Air Minum Layak	89	96.83%	-7.83%	
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	99	80.00%	19%	
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Provinsi	Provinsi	Provinsi	
16	Rasio rumah layak huni	104	98.03	5.97%	Disperkim
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	89	93.78	-4.78%	Dishub
18	Indeks SPBE	165	86.05	78.95%	Diskominfo
19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	97.96	72.63	25.33%	DLHK
20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	105.88	87.63	18.25%	
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100.22	95.26	4.96%	
22	Opini BPK	100	91.35	8.65%	BPKAD



No	Indikator Kinerja	2025		Tingkat Efisiensi	OPD
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		Penanggung jawab
23	Nilai/Predikat AKIP	91	99,21	-8,21%	Bagian Organisasi
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau	100	83,89	16,11%	Bagian Tata Pemerintahan
25	Survei Kepuasan Masyarakat	90	74,71	15,29%	Bagian Organisasi

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.49

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD
			Penyelenggaraan
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		4. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD
			Penyelenggaraan
		5.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	6.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	7.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		8.Program Hubungan Industrial	
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	9.Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	10.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		11.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		12.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	13.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		14.Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	15. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		16.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		17.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec.Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD
			Penyelenggaraan
		19.Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	20.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		21.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		22.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	23.Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain- lain)	24.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	25. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		26.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		27.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		28.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	29.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		30.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		31.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		32.Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub



Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
MISI KE 1							
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN BERBUDI LUHUR							
TUJUAN KE 1 Mewujudkan Masyarakat Berau yang Berdaya Saing							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp287.774.655.848	Rp253.177.730.493	87.98%	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp24.293.949.801	Rp20.696.983.476	85.19%	
Rata - Rata Capaian							
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp141.464.795.207	Rp122.873.840.462	86,86%	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesihatan	Rp3.565.207.444	Rp3.290.621.020.0 0	92,30%	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp782.134.057	Rp536.468.004	68,59%	Dinas Kesehatan



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp361.260.381	Rp326.512.411	90,38%	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp71.291.245.672	Rp64.546.373.441	90,54%	Rsud Abdul Rivai
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp1.402.338.679	Rp1.239.979.150	88,42%	Rsud Abdul Rivai
		9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp1.996.351.111	Rp1.617.180.115	81,01%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI KE 2 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN OPTIMALISASI SEKTOR HILIR SUMBER DAYAALAM DAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS YANG BERBASIS KERAKYATAN DENGAN PERLUASAN LAPANGANKERJA DAN PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL							
Tujuan Ke 2 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Yang Mantap Dan Berdaya Saing							
3	Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau	10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp2.784.682.118	Rp2.506.827.593	90,02%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp1.310.166.110	Rp1.162.778.240	88,75%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
		12	Program Hubungan Industrial	Rp3.124.448.610	Rp2.213.488.177	70,84%	
Rata - Rata Capaian							
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Program Pemberdayaan Sosial	Rp1.159.823.850	Rp1.159.208.326	99,95%	Dinas Sosial
		14	Program Rehabilitasi Sosial	Rp8.551.297.521	Rp11.525.295.902	134,78 %	
		15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp1.201.983.100	Rp2.547.604.281	211,95 %	
		16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp3.309.051.537	Rp2.562.992.544	77,45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp63.064.477.818	Rp51.556.250.777	81,75%	Sekretariat Daerah Bagian Tapem dan Kesra
		18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp17.683.866.640	Rp16.617.221.959	93,97%	Kecamatan Tanjung Redeb
Rata - Rata Capaian							
Tujuan Ke 3 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan							
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Rp500.770.091	Rp378.211.714	75,53%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
			Dan Usaha Mikro (UMKM)				Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		20	Program Pengembangan UMKM	Rp1.037.261.127	Rp950.934.419	91.68%	
		21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp57.899.595	Rp23.178.960	40.03%	
		22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp10.604.217.012	Rp8.254.281.996	77,84%	
		23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	
Rata - Rata Capaian							
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp38.380.955.914,98	Rp35.150.756.446,99	91.58%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		26	Program Pemasaran Pariwisata	Rp8.269.664.353	Rp7.991.646.110	96,64%	
		27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp1.219.442.069	Rp1.122.147.807	92,02%	
		28	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp3.579.808.623	Rp2.243.418.004	62,67%	
Rata - Rata Capaian							



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp2.121.268.155	Rp1.968.459.624	92,80%	Dinas Perkebunan
		30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp520.469.447	Rp498.438.276	95,77%	
		31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp769.123.205	Rp706.941.101	91,92%	
		32	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp196.522.929	Rp183.210.094	93,23%	
		33	Program Penyuluhan Pertanian	Rp1.257.217.284	Rp1.147.988.191	91,31%	
		34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp9.981.517.585	Rp8.769.430.156	87,86%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
		35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp2.336.242.394	Rp2.075.162.649	88,82%	
		36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp3.984.019.500	Rp3.946.888.589	99,07%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
		37	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp246.923.951	Rp218.676.789	88,56%	
		38	Program Penyuluhan Pertanian	Rp1.764.653.916	Rp1.443.266.938	81,79%	
		39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp4.350.405.914	Rp3.939.768.838	90,56%	Dinas Perikanan
		40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp3.805.138.393	Rp3.436.731.442	90,32%	
		41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp1.568.305.163	Rp1.479.456.233	94,33%	
Rata - Rata Capaian							
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp162.799.760	Rp83.710.490	51,42%	Dinas Pangan
		43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp3.732.559.055	Rp3.063.683.201	82,08%	
		44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp432.644.512	Rp405.339.397	93,69%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
Rata - Rata Capaian							
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp323.356.053.522	Rp304.232.265.403	94,09%	DPUPR
		46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp362.704.802.592	Rp351.206.795.167	96,83%	
		47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp303.889.329.958	Rp298.888.197.627	98,35%	
		48	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp255.172.896.438	Rp243.082.614.834	95,26%	
		49	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp1.422.864.977.2 32	Rp1.379.934.714.4 03	96,98%	
		50	Program Pengembangan Perumahan	Rp478.907.650	Rp478.812.331	99,98%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		51	Program Kawasan Permukiman	Rp663.365.828	Rp478.812.331	72,18%	
		52	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp983.021.675	Rp837.794.895	85,23%	
		53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Rp1.772.250.000	Rp1.718.183.000	96,95%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
			Utilitas Umum (PSU)				
		54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp17.338.372.551	Rp8.306.854.966	47.91%	Dinas Pertanahan
Rata - Rata Capaian							
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp68.298.279.751	Rp66.553.150.952	97.44%	Dinas Perhubungan
		56	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp29.715.221.771	Rp28.399.518.107	95.57%	
		57	Program Aplikasi Informatika	Rp20.782.085.628	Rp17.883.604.812	86.05%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 5							
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup							
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	58	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp6.778.344.643	Rp6.514.591.016	96.11%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Rp358.412.430	Rp271.925.700	75.87%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
			Beracun (Limbah B3)				
		60	Program Pengelolaan Persampahan	Rp24.723.469.981	Rp23.941.701.478	96,84%	
Rata - Rata Capaian							
MISI KE 4							
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL							
Tujuan 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi							
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	61	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp2.932.060.660	Rp2.332.297.424	79,54%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp6.681.977.870	Rp6.133.927.984	91,80%	
		63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp6.663.342.940	Rp5.832.784.044	87,54%	Badan Pendapatan Daerah
		64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp452.908.720	Rp393.481.218	86,88%	
		65	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp5.022.453.001	Rp4.789.890.616	95,37%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		66	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp3.717.854.983	Rp3.593.263.014	96,65%	



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
		67	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp4.622.970.621	Rp3.393.249.916	73.40%	Inspektorat
		68	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	Rp2.045.866.178	Rp1.528.833.264	74.73%	
		69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp36.838.989.412	Rp31.283.778.917	84,92%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		70	Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp81.395.767.456	Rp65.821.704.086	80.87%	Sekretariat Daerah
		71	Program Penataan Desa	Rp318.082.485	Rp199.762.703	62.80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata - Rata Capaian							
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggara n daerah	72	Program Kepegawaian Daerah	Rp5.247.880.570	Rp5.003.583.541	95,34%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp7.044.599.736	Rp6.248.704.665	88,70%	
		74	Program Penyelenggaraan PemerintahanDan Pelayanan Publik	Rp233.759.888	Rp132.595.983	56,72%	Kecamatan Tanjung Redeb



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH		ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				PAGU	REALISASI	%	
		75	Program Pembinaan Dan Pengawasan PemerintahanDes a	Rp5.497.024	Rp0	0,00%	
		76	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp4.701.897.120	Rp3.979.287.075	84,63%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Berau tidak menerima dan melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB IV****PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****4.1 Urusan Pendidikan**

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Pendidikan adalah :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
- b. Pendidikan Dasar dengan Indikator Pencapaian adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan dengan Indikator Pencapaian adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM urusan pendidikan yaitu :

tabel. 4.1

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1	Pendidikan Anak Usia Dini		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8425
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	1 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	45.1
	2 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	61
2	Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	46305
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	SD		
	1 . Kemampuan Literasi	Nilai	56.61
	2 . Kemampuan Numerasi	Nilai	50.09
	3 . Indeks Iklim Keamanan	Nilai	71.03
	4 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	69.18
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.96
	SMP		
	1 . Kemampuan Literasi	Nilai	71.45
	2 . Kemampuan Numerasi	Nilai	62.64
	3 . Indeks Iklim Keamanan	Nilai	72.73
	4 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	71.22
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.6
3	Pendidikan Kesetaraan		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1096
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	31.96

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



4.1.3 Realisasi

Realisasi yang terlayani dari target yang sudah ditetapkan SPM dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

tabel. 4.2

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				98.65 %
1	Pendidikan Anak Usia Dini				99.35 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8425	8425	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.35 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	96.74 %
	1 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	41.5	42.85	95.01 %
	2 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	61	60.06	98.46 %
2	Pendidikan Dasar				99.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	46305	46305	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.71 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	98.54 %
	SD				98.58 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	1 . Kemampuan Literasi	Nilai	56.61	62.1	100.00 %
	2 . Kemampuan Numerasi	Nilai	50.09	56.4	100.00 %
	3 . Indeks Iklim Keamanan	Nilai	71.03	70.12	98.72 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.18	68.18	98.55 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.96	54.46	95.61 %
	SMP				98.50 %
	1 . Kemampuan Literasi	Nilai	71.45	77.84	100.00 %
	2 . Kemampuan Numerasi	Nilai	62.64	70.31	100.00 %
	3 . Indeks Iklim Keamanan	Nilai	72.23	70.73	97.92 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.22	70.21	98.58 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.6	57.2	95.97 %
3	Pendidikan Kesenjangan				96.88 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1096	1096	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.88 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	84.42 %
	1 . Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	31.96	26.98	84.42 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

4.1.4 Alokasi Anggaran

tabel. 4.3

Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	5,173,975,429,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	834,725,586,672
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,669,451,173,344
	APBD	1,669,451,173,344
	A. APBD MURNI	834,725,586,672
	B. APBD DAU	703,458,364,672



NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBD DAK FISIK	978.979.000
	D. APBD DAK NON FISIK	130.288.243.000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

tabel. 4.4

Rincian kegiatan

N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				82.493.272.356	76.824.082.395	93.13 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			7.288.424.449	6.162.906.092	84.56 %
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah)	Ruang	656.989.125	651.947.250	99.23 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	3.828.500.000	3.119.000.000	81.47 %
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	86.280.000	55.842.560	64.72 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Dokumen	91.063.684	70.657.845	77.59 %



N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
			Bidang Pendidikan				
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	00.00 %
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	00.00 %
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,064,626,000	1,025,131,150	96.29 %
		Kekhususan PAUD					
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	00.00 %
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	476.990,408	417,407,250	87.51 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	500,715,871	422,409,332	84.36 %
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	275,920,170	207,218,785	75.10 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	40,226,432	17,625,500	43.82 %
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	64,479,447	40,447,000	62.73 %



N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	85.823.385	65.834.420	76.71 %
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	81.013.375	47.790.000	58.99 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	35.796.552	21.595.000	60.33 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			42.057.978.089	39.394.290.652	93.67 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	3.161.817.459	3.073.746.824	97.21 %
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	143.313.568	128.294.000	89.52 %
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.499.837.050	1.473.042.974	98.21%
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	14.584.451.636	13.954.228.795	95.68 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	17.679.162.682	16.513.795.979	93.41 %
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.173.966.968	1.112.560.000	94.77 %
		8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	81.251.552	37.092.559	45.65 %
		9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.082.676.825	810.287.566	74.84 %
		10	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	149.714.610	141.414.340	94.46 %
		11	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	49.996.847	42.721.500	85.45 %
		12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	79.532.550	63.578.500	79.94 %
		13	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Komunitas	80.935.239	44.062.000	54.44 %



N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
			Tenaga Kependidikan				
		14	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1,498,849,849	1,471,707,475	98.19%
		15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	35,796,552	21,085,000	58.90 %
		16	Penyelenggaraa n Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidika n	437,889,470	292,575,520	66.81 %
		29	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidika n	144,715,046	75,481,000	52.16 %
		30	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	174,070,186	138,616,620	79.63 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)			33,146,869.81 8	31,266,885.65 1	94.33 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	10,824,092.85 5	10,333,402.00 7	95.47 %



N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4,189,590,710	3,858,555,451	92.10 %
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	4,319,973,922	4,250,329,300	98.39 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	106,110,000	99,330,000	93.61 %
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	5,504,956,118	4,981,258,709	90.49 %
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	00.00 %
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	95,094,723	87,339,000	91.84 %
		9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	534,522,564	451,141,510	84.40 %
		12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	66,015,086	62,393,900	94.51 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		13	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	81.246,864	61.028,214	75.11%
		14	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	660.608,903	529.847,363	80.21 %
		15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	35.298,552	26.703,452	75.65 %
		16	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	6.433.351,434	6.259.344,270	97.30 %
		35	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	296.008,087	266.212,475	89.93%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebagai berikut:



tabel. 4.5

Dukungan personil PNS

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS PENDIDIKAN	4.037	1599	2438	3006	52	711	51	36	3.116	71	

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

1. Proses pengumpulan data SPM bidang pendidikan mengalami kendala pada saat menghitung selisih jumlah penduduk usia sekolah 7-18 tahun antara data Disdukcapil dengan Data Kemendikbud yang bersumber dari Dapodik terjadi perbedaan dimana angka dari data base Dapodik lebih banyak dari angka yang bersumber Disdukcapil, sehingga menyebabkan perhitungan yang seharusnya akan dilayani tidak sinkron
2. Masih rendahnya pemahaman terkait Standar Pelayanan Minimal pendidikan terutama pada Bidang teknis sebagai pelaksana kegiatan yang mendukung capaian SPM
3. Belum adanya intervensi terhadap penduduk usia sekolah yang belum bersekolah
4. Masih terdapat beberapa sekolah belum menyelesaikan pengisian Sulingjar dan Asesmen Nasional

Solusi:

1. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan mengupayakan adanya sarana dan prasarana yang mendukung akses internet khususnya daerah yang masih kategori blank spot
2. perlu adanya bimtek secara berkala



3. perlu adanya rapat koordinasi secara berkala diinternal Dinas Pendidikan
4. Perlu adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut
5. karena kaitannya dengan lintas OPD, hanya memberikan saran saja untuk OPD yang menangani agar dapat pro aktif lagi pemetaan terhadap penduduk non dokumen

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. Indikator-indikator yang ada pada setiap layanan baik Paud, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan kegiatan operasional yang mengacu pada Permendikbudristek terbaru Nomor 32 tahun 2022 secara detail belum dirincikan sehingga kesulitan dalam hal perhitungan kebutuhan
2. Pada bidang teknis sebagai pelaksana kegiatan operasional SPM persentase kegiatan yang mendukung SPM masih minim Antara dokumen perencanaan dengan sistem untuk penganggaran belum sepenuhnya terhubung sehingga kesulitan dalam memunculkan sub kegiatan yang mendukung pemenuhan capaian SPM

Solusi:

1. perlu dilakukan koordinasi ke tingkat propinsi atau ke tingkat pusat yaitu Kemendikbud
2. Sub kegiatan yang belum ada pada dokumen anggaran perlu di ajukan kembali ke bidang anggaran dengan catatan sudah bersama sama memahami SPM itu sendiri

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

1. Antara perencanaan yang mendukung capaian pemenuhan SPM terhadap penganggaran belum terintegrasi dengan baik.



2. Contoh operasional kegiatan yang mendukung SPM pada masing-masing indikator belum terlihat dengan detail

Solusi:

1. perlu adanya integrasi terarah antara OPD dan Bagian Penganggaran
2. Masih menunggu perubahan dari Kemendagri pada aplikasi E-SPM

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional yang mendukung SPM masih relatif sangat kecil dan belum maksimal.
2. Banyak ditemukannya sub kegiatan yang tidak sesuai antara isi dan nama programnya

Solusi:

1. perlu adanya upaya peningkatan dari sisi penganggaran secara signifikan terhadap kegiatan operasional yang mendukung capaian SPM
2. perlu adanya koordinasi secara internal dan berkala

e. LAIN – LAIN

Permasalahan:

Capaian angka partisipasi sekolah belum 100% terutama anak usia PAUD 5-6 Th dan Pendidikan Dasar khususnya SMP 13-15 Th, dikarenakan sasarannya masih pada siswa yang bersekolah sementara penduduk usia sekolah yang belum sama sekali bersekolah belum di programkan

4.2 Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :



4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan Kesehatan adalah

- a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan indikator pencapaian Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan indikator pencapaian Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
- c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator pencapaian Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
- d) Pelayanan kesehatan balita dengan indikator pencapaian Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan indikator pencapaian Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan



- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM urusan Kesehatan yaitu :

tabel. 4.7

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4891
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampu/Vial	4891
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	30500
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	4891
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	21
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	21
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	21
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	21
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4891
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4891
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	11 . Gel USG	Botol	64
	(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)		
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	5
	(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"		
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)		
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)		
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	4891
	(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4891
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Formulir partograph	Formulir	10000
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4891
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4891
	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)		
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	5
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)		
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)		
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)		
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4615
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4615
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	1200
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	1800
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4615
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	4615
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4615
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	53
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2423
4	Pelayanan Kesehatan Balita		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18396
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	18396
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	18396
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	18396
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1100
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	23600



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	(sesuai standar 12-59 bulan)		
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	666
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	1000
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	900
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	570
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	570
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	570
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	570
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	21
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	21
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	2100
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	20 . Guru PAUD	Orang	229
	21 . Kader Kesehatan	Orang	2423
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38299
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	38299
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	38299
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	38299
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	38299
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	38299



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)		
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	30500
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	21
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	354
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	21
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	2434
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	17
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	227
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	2423
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	178990
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	21



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	21
	4 . Alat : Glukometer	Unit	21
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	21
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	21
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	21
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	21
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	21
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	21
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	0
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	1
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	1
	c. Vasektomi set	Unit	1
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	21
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	448
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2423
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	20307
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	21
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	21
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	21
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alcohol	Paket	21



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	3829
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	20307
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Buku	21
	8 . Tenaga medis : Dokter	Paket	252
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2423
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17362
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	21
	(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)		
	2 . Obat Hipertensi	Paket	530000
	3 . Tensimeter	Unit	21
	(mengukur tekanan darah)		
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)		
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	53
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4493
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	290000
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	21
	(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)		
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		
	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	21
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	190
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	21
	bentuk fisik atau elektronik)		
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Paket	400
	(pengobatan/medikasi)		
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	2500
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)		
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	21
	(pencatatan dan pelaporan)		
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	52
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	20
	(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)		
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	6
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	2
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7247
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	2 . Reagen Zn TB	Kit	50
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	7247
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	7247



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	200
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	21
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21
	8 . Tuberkuilin	Vial	90
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	4
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	786
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	212
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	14
	15 . Kader Kesehatan	Orang	2423
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6864
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6864
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6864
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6864
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	6
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	47
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	86



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	1

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

4.2.3 Realisasi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terhadap 12 indikator dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

tabel. 4.8

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA		86.29 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				85.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	65.21 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4891	3948	81.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.78 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	98.91 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	4891	4891	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	30500	30500	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	4891	4891	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	21	21	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	21	21	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	21	21	100.00 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	21	21	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4891	4891	100.00 %
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4891	4891	100.00 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	64	64	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	5	7	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	302	438	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	415	801	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	221	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	4891	3987	81.52 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				94.18 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	74.18 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4891	4535	92.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	10000	10000	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4891	4891	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	4891	4891	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	5	7	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	302	438	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	415	801	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	221	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				88.35 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	68.35 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4615	3943	85.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4615	4615	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	1200	1200	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	1800	1800	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4615	4615	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	4615	4615	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2615	4615	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3	4	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	221	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	53	53	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2423	2649	100.00 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita				82.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	62.08 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18396	14276	77.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	18396	18396	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	18396	18396	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	18396	18396	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1100	1100	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	23600	23600	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	666	666	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	1000	1000	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	900	900	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	570	570	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	570	570	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	Vaksin	570	570	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	570	570	100.00 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	21	21	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	21	21	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	2100	2100	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	92	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	229	229	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	2423	2649	100.00 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				96.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	76.52 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38299	36633	95.65 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	38299	38299	100.00 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	38299	38299	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	38299	38299	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	38299	38299	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	38299	38299	100.00 %
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	30500	30500	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	21	21	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	354	354	0.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	21	21	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	2434	2434	100.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	17	22	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	221	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	227	227	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	2434	2649	100.00 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				52.61 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	32.61 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	178990	72957	40.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	2 . Alat dalam melakukan skrining: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	21	21	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	21	21	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	21	21	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	21	21	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	21	21	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	21	21	100.00 %
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	21	21	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	21	21	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	0	3	100.00 %
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	1	1	100.00 %
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	1	1	100.00 %
	c. Vasektomi set	Unit	1	1	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	21	21	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	448	448	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	92	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2423	2649	100.00 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				70.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	50.40 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20307	12793	63.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	21	21	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	21	21	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	21	21	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	3829	3829	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	20307	20307	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	92	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2423	2649	100.00 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				78.06 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	58.06 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17362	12600	72.57 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	530000	530000	100.00 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	1	1	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	21	21	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	92	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	48	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	53	53	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	221	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				88.34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	68.34 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4493	3838	85.42 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	290000	290000	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	21	21	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1	1	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	92	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	221	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	28	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47	107	100.00 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	230	269	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	100.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	21	21	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	400	400	0.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2500	2500	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1	1	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	52	92	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	20	21	100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	2	2	100.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	6	6	100.00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7247	7966	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				80.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	50	50	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	7247	7247	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	7247	7247	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	200	200	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	21	21	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21	21	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	90	90	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	4	6	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	786	801	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	212	221	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47	107	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	14	14	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	2423	2649	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6468	7523	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6864	6864	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6864	6864	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6864	6864	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	6	6	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	438	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	801	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	47	107	100.00 %
	9 . Tenaga kesechatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	86	116	100.00 %
	10 . Tenaga non kesechatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	1	1	100.00 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

4.2.4 Alokasi Anggaran

tabel. 4.9

Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	5.173.975.429.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2.649.386.257



NO	PENDANAAN	PAGU
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3.246.825.324
	APBD	3.246.825.324
	A. APBD MURNI	3.246.825.324
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

tabel. 4.10

Rincian Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.246.825.324	2.649.386.257	81.60 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.246.825.324	2.649.386.257	81.60 %
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	606.525.000	430.797.527	71.03 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	703.188.000	592.715.796	84.29 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	321.997.572	224.085.397	69.59 %



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	190.959.925	185.610.102	97.20 %
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	105.567.971	97.799.497	92.64 %
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	59.476.181	44.105.185	74.16 %
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	319.229.538	317.376.906	99.42 %
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	59.229.217	24.839.200	41.94 %
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	243.354.564	235.534.662	96.79 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	58.984.699	34.658.213	58.76 %
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang	Orang	355.256.489	277.980.856	78.25 %



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		Terduga Tuberkulosis				
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	223.056.168	183.882.916	82.44 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

4.2.5 Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan sedangkan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berikut data pegawai pada Dinas kesehatan :

tabel. 4.11

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Urusan Kesehatan

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SM P	SM A	DI / DI I	DII I	DIV / S1	S2	S 3
1	DINAKESKATA N	4037	1599	2438	1145	52	711	51	36	3116	71	0



2	RSUD DR. ABDUL RIVAI	666	206	460	496	18	85	0	274	148	14 1	0
---	-------------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	---	-----	-----	---------	---

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

1. Keterlambatan pihak PUSKESMAS dalam penyampaian data kebidang.
2. Kurangnya koordinasi / MOU pihak jejaring dengan puskesmas

Solusi:

1. Melakukan Sosialisasi Penginputan, Pencatatan dan Pelaporan
2. Melakukan Perubahan kesepakatan ulang oleh Puskesmas terkait pengumpulan data SPM
3. Selalu melakukan Monitoring Laporan di share setiap minggunya di grup masing masing pengelola program

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. masih banyak Masyarakat melakukan pemeriksaan klinik kesehatan
2. Besarnya Jumlah sasaran sehingga terjadi perbedaan antara sasaran kabupaten dengan sasaran rill
3. Target atau sasaran pindah sehingga perhitungan tidak sesuai yang diharapkan
4. Kurang/Rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang melakukan pemeriksaan di Puskesmas
5. Penyebaran nakes dan dokter yang tidak merata
6. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan rutin/berkala bagi lansia



7. Lansia lebih percaya melakukan pemeriksaan rutin di dokter praktek maupun rumah sakit daripada ke posyandu maupun Puskesmas

Solusi:

1. Melakukan Pemetaan/Perhitungan ulang target / sasaran
 2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat bahwa melakukan pemeriksaan Puskesmas sangat lah penting
 3. Melakukan penataan sebaran nakes dan dokter dan sumberdaya kesehatan lainnya.
 4. melakukan Kordinasi oleh pihak klinik terkait data masyarakat yang melakukan pemeriksaan di klinik kesehatan
- c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

Dana minim bagi beberapa kegiatan..

Solusi:

1. Alokasi Dana bagi pelayanan yang kekurangan anggaran
 2. Mengusulkan ulang anggaran sesuai kebutuhan program
- d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Kurang/Rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang melakukan pemeriksaan di Puskesmas
2. Petugas yang belum terlatih dan kurang aktif dalam menjalankan program
3. Target yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan pindah keluar kabupaten
4. Budaya dimasyarakat
5. Kurangnya petugas pelatih
6. Adanya penggantian petugas sehingga Program/Kegiatan dilaksanakan kurang maksimal



7. Belum ada puskesmas perkotaan (Tanjung Redeb, puskesmas Kampung Bugis, Smbaliung, Gunung tabur dan Teluk bayur) tidak ada Puskesmas yang melaksanakan layanan persalinan 24 Jam

Solusi:

1. Faskes harus mampu mengcover kegiatan SPM
2. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat
3. Melaksanakan Pelatihan Bagi Petugas Pelaksana
4. Melakukan Pemetaan/Perhitungan ulang target / sasaran
5. Pengusulan Puskesmas Perkotaan sebagai BLUD dan pelayanan 24 Jam.

e. LAIN - LAIN

Permasalahan:

1. Kurangnya informasi bagi penerima layanan kesehatan
2. Kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan bagi penerima layanan untuk ke fasyankes
3. Kurangnya sosialisasi pencatatan pelaporan
4. Blangko atau form pengisian kegiatan tertentu tidak tersedia
Perubahan standar layanan dari K4 menjadi K6, yang mengikut sertakan layanan dokter pada TM 11 dan TM3 (32-36 minggu)
5. Rendah nya cakupan layanan Kunjungan ANC pada usia kehamilan <12 minggu ada satu puskesmas yang belum memiliki Dokter
6. Layanan Persalinan pada saat ini masih menggunakan Komposit layanan dengan 4 tangan

Solusi:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi
2. Melakukan Sosialisasi Penginputan, Pencatatan dan Pelaporan



4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Pekerjaan Umum Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar pada meliputi:

- a) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel Berikut :

tabel. 4.14

Target pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7358



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	JARINGAN PERPIPAAN		
	1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1551
	2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1315
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
	3 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0
	4 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1218
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	250
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0
	3 Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas	Rumah Tangga	0



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota		
	4 Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	250

4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Urusan SPM Pekerjaan Umum dapat terlihat dalam tabel berikut :

tabel. 4.15

Realisasi Pencapaian Urusan SPM Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA		100.00 %	
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7358	11634	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN					



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1551	2448	100.00 %
	2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1315	2064	100.00 %
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	100.00 %
	4 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	100.00 %
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1218	1562	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
				/ Terpenuhi	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	250	334	100.00 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	100.00 %
	3 Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	100.00 %
	4 Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	250	334	100.00%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan pelayanan SPM urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



tabel. 4.16
Anggaran dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	5,173,975,429,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2,377,610,231,453
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	391,244,259,748
	APBD	391,244,259,748
	A. APBD MURNI	391,244,259,748
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

tabel. 4.17
Rincian Kegiatan

N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISASI	SERAPA N
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				362,704,802,592	350,945,744,715	96.76%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			362,704,802,592	350,945,744,715	96.76%
		23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	168,828,208	135,963,000	80.53%
		25	Penyusunan Rencana.	Dokumen	5,255,383,999	5,024,663,612	95.61 %



N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISASI	SERAPA N
			Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Det ik	94.517.188,250	89.667.482,39 8	94.87 %
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Det ik	38.920.476,886	38.127.005,95 4	97.96%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	3.419.919,750	3.282.765,941	95.99%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	220.423.005,49 9	214.707.863,8 10	97.41%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				7.422.135,999	7.324.382,895	98.68 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.422.135,999	7.324.382,895	98.68 %
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelola an Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	6.435.434,999	6.357.541,795	98.79 %



4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

tabel. 4.18

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214	164	50	43	7	75	0	13	86	31	2

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

1. Luasnya wilayah Kabupaten Berau yang meliputi 13 kecamatan dengan kondisi geografis berkontur, rentang jarak yang jauh dan pola Kampung/ permukiman yang sporadic dan berjauhan
2. butuh dilakukan update data secara berkala dikarenakan luasnya wilayah dan cepatnya data berubah
3. terbatasnya jumlah anggota yang melakukan pengumpulan data

Solusi:

1. Direncanakan untuk melakukan survey sekala berkala baik secara mandiri atau melalui konsultan individu
2. Penambahan anggota pengumpul data atau di bantu melalui mekanisme konsultan individu

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:



1. Jumlah penduduk Kabupaten Berau yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang harus dilayani juga semakin meningkat
2. Dalam kondisi dan lokasi tertentu terjadi permasalahan status lahan yg muncul sebagai permasalahan baru.
3. tidak adanya satu data pada daerah sehingga perhitungan kebutuhan terkadang memakai pendekatan yang berubah-ubah

Solusi:

1. Dilakukan perhitungan pada setiap project yang ada pada kampung tersebut
2. Kordinasi dengan pihak terkait
3. Selalu berkordinasi dengan dinas2 terkait mengenai penyamaan pandangan dan data

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

1. Dokumen Perencanaan / DED sebagian hasil produk tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlu di lakukan update harga dan dinamika lapangan
2. Masih ditemukan pelaksanaan kegiatan yang tidak mengacu pada Konsep pengembangan yang ada pada Rencana Induk SPAM yang dimiliki
3. Kurang / terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh Pemerintah dalam rangka Revitalisasi Dan Pembangunan Baru
4. jumlah penganggaran dengan realisasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga kenaikan capaian sangat sedikit

Solusi:

1. Untuk daerah yang dednya sudah melewati bertahun-tahun akan di lakukan review atau perencanaan ulang
2. Di sinkronkan pekerjaan dengan renja dan rispam yang ada
3. Kordinasi dengan pihak terkait



4. Kordinasi dengan pihak terkait dan biasanya dilakukan pembangunan secara bertahap

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelola dan memelihara Sarana dan Prasarana yang ada, sehingga terkadang perlu dilakukan perbaikan dan penggantian terhadap sarana dan prasarana tersebut, hal ini yang menyebabkan angka capaian tidak terlalu besar naiknya,
2. pada bidang DPUPR belum terlaksananya kegiatan sampai pada bulan juli sehingga realisasi dirasa akan ada pada triwulan 3 atau 4
3. perlu dilakukan percepatan program agar bisa memenuhi pelaporan triwulan 1 2 dan 3 dikarenakan sifat pekerjaan PUPR yang akan selesai pada triwulan 4

Solusi:

1. Dilakukan sosialisasi dan kordinasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi tersebut
2. Percepatan program dan proses tender diperlukan dengan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait dan sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelaporan sesuai data yang di dapat secara real

LAIN – LAIN

Permasalahan:

1. Lemahnya Pendataan dan updating nilai cakupan pelayanan Air Minum dan Limbah Domestik, yang berdampak pada akurasi nilai capaian yang diperoleh,
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pada instansi pada tahap perencanaan dan pengawasan serta pendampingan pasca kontruksi,



3. ada perbedaan sistem pelaporan antara kemendagri dan pendekatan dari kemenPUPR

Solusi:

1. Selalu berkordinasi dan pengupdatetan data sesuai data-data yang masuk pada setiap tahunnya
2. Akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada awal kegiatan dan akhir kegiatan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan capaiannya

Membuat data untuk kedua pendekatan agar tetap bisa saling bersinergi dan saling berkordinasi

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dua jenis Pelayanan Dasar tersebut sebagai Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. yaitu :

- a. Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

4.4.2 Target Pencapaian SPM

tabel. 4.19

Jenis layanan, indikator dan target dari layanan dasar SPM Bidang Perumahan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
01.00	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (100%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0 (tidak terjadi bencana)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Pendataan	Persen	100%
	2. Perhitungan	Persen	100%
	3. Perencanaan	Persen	100%
	UPLOAD FILE PENDUKUNG		
02.00	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (100%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Pendataan	Persen	100%
	2 Perhitungan	Persen	100%
	3 Perencanaan	Persen	100%

4.4.3 Realisasi

tabel. 4.20

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4 -5 -6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA	100.00 %
01.00	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 100%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Pendataan	Persen	100%	100%	100%	100%
	2. Perhitungan	Persen	100%	100%	100%	100%
	3. Perencanaa	Persen	100%	100%	100%	100%
	UPLOAD FILE PENDUKUNG					
02.00	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (100%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					100.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Pendataan	Persen				100.00 %
	2 Perhitungan	Persen				100.00 %
	3 Perencanaan	Persen				100.00 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



4.4.4 Alokasi Anggaran

tabel. 4.21

Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	5.173.975.429,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	23.201.457.605
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	346.504.000
	APBD	346.504.000
	A. APBD MURNI	346.504.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

tabel. 4.22

Rincian Kegiatan

No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISAS I	SERAPA N
	KAB. BERAU				346.504.000	339.673.401	98.03 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				346.504.000	339.673.401	98.03 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			346.504.000	339.673.401	98.03 %
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	Dokumen	148.438.600	145.730.100	98.18%



No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISAS I	SERAPA N
			Program Kabupaten/Kot a				
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a	Dokumen	198.065.400	193.943.301	97.92%

4.4.5 Dukungan Personil

Secara umum sumber daya manusia yang merupakan dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Berau sebagai berikut.

tabel 4.23

Dukungan Personil

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49	25	24	19	1	11	0	0	31	6	

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

Pendataan dilakukan secara bertahap mengingat jangkauan dan biaya yang tersedia

Solusi:

Dilakukan Perencanaan pendataan secara bertahap pada Dokumen Perencanaan Daerah



b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

perhitungan kebutuhan dilaksanakan setelah pengumpulan data terlaksana dan secara bertahap

Solusi:

Memastikan perhitungan kebutuhan dapat segera dilaksanakan dan dipastikan tetap dimasukkan dalam dokumen perencanaan Daerah

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

Biaya yang diperlukan direncanakan secara bertahap sesuai rencana aksi dengan target yang bertahap

Solusi:

Dilakukan Perencanaan pendataan secara bertahap pada Dokumen Perencanaan Daerah

PELAKSANAAN

Permasalahan:

Pelaksanaan masih berproses untuk pembangunan kembali dan masih terkendala dengan cuaca

Solusi

Pengawasan dan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

A. Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang ditangani SATPOL PP adalah



1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum (Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi) dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi)
 2. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum (Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu) dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu)
- B. Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang ditangani BPBD adalah
1. Pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan **Satpol PP dan BPBD**



tabel. 4. 24

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum (Satpol PP dan BPBD)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (100%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	3
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	7
	Data Dukung : 6403-202504280845157 SOP SATPOL PP.pdf Status : Approved		
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	53



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1
	Data Dukung : 6403-20260120100017STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAEARAH DAN PERATURAN BUPATI rev.pdf		
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	5
	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)		
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	5
	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)		
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (100%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana	0	0
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	120
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	3
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	6
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	6
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	36
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	15
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (100%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	Dokumen	1
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	Dokumen	1
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	2
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	6
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	6
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	0
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	12
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	0
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	0
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	0
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu		
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (100%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	2



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	37
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	55
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	25
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	4
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	21
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3200
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (100%)			
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	30



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	3
	Data Dukung : 6403-20250708063440SOP PEMADAM KEBAKARAN.pdf Status : Approved		
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	110
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	27
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	37
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	28

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Berau 2025

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan **Satpol PP dan BPBD**

tabel. 4. 26

Relisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibum (satpol PP dan BPBD)

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				96.67 %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)				96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10	10	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				83.33 %
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	3	3	100.00 %
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)				
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	7	7	100.00 %
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)				
	Data Dukung : 6403-202504280845157 SOP SATPOL PP.pdf Status : Approved				
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas	Orang	53	53	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	0.00 %
	Data Dukung : 6403-20260120100017STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAEARAH DAN PERATURAN BUPATI rev.pdf				
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	5	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	5	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN				100.00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064	55969	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	100.00%
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	100.00 %
	1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksempler	120	120	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	3	3	100.00%
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	6	6	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	6	6	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5	5	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	36	36	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	15	15	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064	11064	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	1	1	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Dokumen	1	1	100.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	2	2	100.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	100.00 %
	3 . Pelatihan. Pencegahan dan Mitigasi		0	0	100.00 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	6	6	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	6	6	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100.00 %
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00 %
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00%
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top	Paket	0	0	100.00%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	exercise (sesuai dengan kebutuhan)				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00%
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2	2	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	12	12	100.00%
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	100.00%
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00%
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	0	0	100.00%
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	0	0	100.00%
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	100.00%
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	01	100.00%
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	100.00%
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	100.00%
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	100.00%
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00%
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	100.00%
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	100.00%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064	16262	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	100.00 %
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	2	2	100.00%
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	37	37	100.00 %
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	100.00%
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	55	55	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	100.00%
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	100.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	25	25	100.00%
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	4	4	100.00 %
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	21	21	100.00%
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	100.00%
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100.00%
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				100.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3200	5695	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	30	30	100.00 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	3	3	100.00%
	Data Dukung : 6403-20250708063440SOP PEMADAM KEBAKARAN.pdf Status : Approved				
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	100	110	100.00%
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	27	27	100.00%
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	37	37	100.00 %
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	37	37	100.00%



4.5.4 Alokasi Anggaran

tabel. 4.28

a. Anggaran dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	5,173,975,429,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	28,564,627,467
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	9,065,810,450
	APBD	9,065,810,450
	A. APBD MURNI	9,065,810,450
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

tabel. 4. 29

b. Rincian Kegiatan

No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
	KAB. BERAU				18,308,847,765	12,585,764,729	68.74 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANSTIBUM)				9,243,037.315	6,980,229.322	75.52 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2,226,146,643	2,093,688,281	94.05 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1,240,877,426	1,225,120,550	98.73 %



No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokume n	136.461.310	120.755.838	88.49 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	293.269.840	258.454.560	88.13 %
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokume n	159.850.920	150.247.950	93.99 %
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	100.707.436	68.459.140	67.98 %
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	151.922.250	146.291.420	96.29 %
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Laporan	143.057.461	124.358.823	86.93 %



No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
	JUMLAH INDIKATOR				2.226,146,6 43	2,093,688,28 1	94.05 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			6.886,708,3 92	4,779,624,25 1	69.40 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	217,392,270	195,845,500	90.09 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapora n	6,669,316,1 22	4,583,778,75 1	68.73 %
	JUMLAH INDIKATOR				6.886,708,3 92	4,779,624,25 1	69.40 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			130,182,280	106,916,790	82.13 %
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS		130,182,280	106,916,790	82.13 %
	JUMLAH INDIKATOR				130,182,280	106,916,790	82.13 %
	JUMLAH PROGRAM				9,243,037,3 15	6,980,229,32 2	75.52 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				6,173,281,2 17	2,834,013,31 0	45.91 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			107,523,919	96,050,700	89.33 %
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	107,523,919	96,050,700	89.33 %
	JUMLAH INDIKATOR				107,523,919	96,050,700	89.33 %



No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.227.221.547	996.024.605	81.16 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	139.768.200	76.188.400	54.51 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokume n	243.551.355	215.789.450	88.60 %
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiata n	67.840.107	63.431.300	93.50 %
		16	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/KotaPelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasa n	550.478.379	491.636.555	98.31 %
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	225.583.506	148.978.900	66.04 %
	JUMLAH INDIKATOR				1.227.221.547	996.024.605	81.16 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			4.544.236.895	1.540.432.498	33.90 %
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	624.210.730	489.494.141	78.42 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	529.316.450	454.057.345	85.78 %
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban	Orang	3.082.468.265	415.974.162	13.49 %



No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
			bencana Kabupaten/Kota				
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	254.271.450	180.906.850	71.15 %
	JUMLAH INDIKATOR				4.544.236.8 95	1.540.432.49 8	33.90 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			294.298.856	201.505.507	68.47 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	65.488.554	54.225.926	82.80 %
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	67.228.747	50.719.505	75.44 %
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	31.350.980	23.373.983	74.56 %
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokume n	130.230.575	73.186.093	56.20 %
	JUMLAH INDIKATOR				294.298.856	201.505.507	68.47 %
	JUMLAH PROGRAM				6.173.281.2 17	2.834.013.31 0	45.91 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				2.892.529.2 33	2.771.522.09 7	95.82 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.911.441.7 94	1.829.875.18 5	95.73 %



No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	710.598,144	701.135,442	98.67 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	117.303,550	108.160,771	92.21 %
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	192.737,800	178.424,400	92.57 %
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokume n	890.802,300	842.154,572	94.54 %
	JUMLAH INDIKATOR				1.911,441,794	1.829,875,185	95.73 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			125,255,558	119,115,056	95.10 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokume n	125,255,558	119,115,056	95.10 %
	JUMLAH INDIKATOR				125,255,558	119,115,056	95.10 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			739,077,187	712,629,312	96.42 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	198,933,837	179,546,200	90.25 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	346,654,426	342,760,418	98.88 %
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	Dokume n	193,488,924	190,322,694	98.36 %



No	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGAR AN	REALISASI	SERAP AN
			melalui penyediaan sarana dan prasarana				
	JUMLAH INDIKATOR				739,077,187	712.629,312	96.42 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			116.754,694	109,902,544	94.13 %
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	116.754,694	109,902,544	94.13 %
	JUMLAH INDIKATOR				116,754,694	109,902,544	94.13 %
	JUMLAH PROGRAM				2,892,529.2 33	2,771,522,09 7	95.82 %

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel. 4. 30

Dukungan Personil

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWA I	LK	P R	JF T	PENDIDIKAN						
						SD/ SM P	SM A	DI/ DI I	DII I	DIV / S1	S 2	S 3
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	182	14 9	33	8	4	119	0	2	54	3	0
2	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	131	12 0	11	54	10	82	0	3	30	6	0



4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

Masih adanya perbedaan pemahaman konsep penerapan SPM di Bidang Bidang sebagai sumber data penerapan dan realisasi SPM

Solusi:

Mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi terhadap penerapan SPM bid Trantibum

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. Diperlukan adanya pendataan ulang terhadap WN yang menjadi sasaran
2. Data penduduk dari sumber Dinas Capil dan Kependudukan belum bisa diakses secara detail (data by name dan by address)
3. Kekurangan keahlian / SDM dalam pencatatan dan perhitungan jumlah yang menjadi target sasaran dalam pemenuhan data SPM

Solusi:

Bekerja sama dengan RT dan Disdukcapil dalam memvalidasi data penduduk yang rawan akan dampak penegakan perda dan perbup

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

Ada beberapa Kegiatan / Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Renstra BPBD sehingga berpengaruh terhadap anggaran yang diperlukan dalam penerapan SPM

Solusi:

Mengusulkan pada Anggaran Tahun Berikutnya

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

Masih adanya beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM, namun belum terdokumentasikan dengan baik dan juga



adanya perbedaan persepsi dalam memahami tentang jenis layanan / mutu layanan SPM

Solusi:

Akan mendokumentasikan dengan baik terkait pelayanan yang SPM bidang Trantibum

4.6 Urusan Sosial

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Sosial adalah :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial



4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pelayanan dasar Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Tebel 4.31

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	10
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	10
	3 . Penyediaan pemakanan	Orang	10
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	10
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian social	Orang	10
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10
	13 . Layanan rujukan	Orang	10



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	20
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	20
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Orang	15
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	20
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10
	12 . Layanan rujukan	Orang	8
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	5
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	13 . Layanan rujukan	Orang	3
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	5
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian social	Orang	5
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	12 . Layanan rujukan	Orang	5
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	200
	2 . Penyediaan sandang	Orang	200
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	15
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	15

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10	10	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	10	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	10	10	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	10	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	20	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	20	20	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	20	20	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	15	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	20	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	10	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	8	8	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	5	5	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5	5	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang	Jumlah Mutu Yang	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Harus Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	5	5	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5	5	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	3	3	100.00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Dipenuhi	Terpenuhi	
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	200	200	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	200	200	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	15	15	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10	10	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	15	15	100.00 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

tabel. 4. 33

a. Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	5,173,975,429,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	24,847,242,069
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	24,847,242,069
	APBD	24,847,242,069
	A. APBD MURNI	24,847,242,069
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0



tabel. 4. 34

b. Rincian Kegiatan

No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
	KAB. BERAU				2,244,426,36 1	639,267,368	28.48 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,244,426,36 1	639,267,368	28.48 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1,485,534 ,943	1,271,422,599,00	85.59 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	204,086,200	111,295,240,00	54.53 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	78,013,244	71,609,506,00	91.79 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	38,834,100	38,144,100,00	98.22 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	126,515,835	105,909,329,00	83.71 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	130,337,700	130,337,700,00	100.00 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	81,974,000	67,115,000,00	80.89 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk	Orang	58,119,640	50,689,484,00	91.96 %



No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
			Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	19.695.310	7.803.400,00	39.62 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	116.941.770	103.061.545,00	88.13 %
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	417.933.634	389.917.840,00	93.30 %
		11	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Orang	52.435.710	35.336.655,00	67.39 %
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	160.647.800	160.202.800,00	99.72 %
	JUMLAH INDIKATOR				1.485.534,943	1.271.422.599,00	0.00 85.59%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			758.891.418	639.267.368	84.24 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	347.287.652	304.881.368	87.79 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	151.770.600	143.160.000	94.33 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	60.677.460	31.350.000	51.67 %



No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	111.720.021	103.951.000	93.05 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	87.435.685	55.925.000	63.96 %
	JUMLAH INDIKATOR				758.891.418	639.267.368	84.24 %
	JUMLAH PROGRAM				2.244.426.361	639.267.368	28.48 %

4.6.5 Dukungan Personil

tabel. 4. 35

Dukungan Personil

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS SOSIAL	50	26	24	19	0	9	0	3	30	8	0

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

Data yang akan diinput pada aplikasi SPM bersumber dari Bidang terkait yang melaksanakan SPM, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang kompeten dalam pengumpulan data yang akurat.

Solusi:

Memaksimalkan potensi SDM yang ada guna terhimpunnya data yang akurat.

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:



1. Ada beberapa kebutuhan klien yang tidak dapat dihitung secara pasti, seperti penyediaan layanan Adminduk, Alat bantu lansia, Rujukan, karena layanan itu belum tentu dibutuhkan oleh semua klien yg terdata.
2. Adanya target yang tidak dapat ditentukan jumlah besarnya secara pasti khususnya pada Gepeng dan Korban Pasca Bencana, karena kejadiannya di tahun depan tidak diketahui, bisa lebih besar atau lebih kecil dari tahun lalu atau tidak ada kejadiannya.
3. Masih diperlukan peningkatan kecermatan pada bidang yang melaksanakan perhitungan kebutuhan SPM bidang sosial ini.

Solusi:

Mengusulkan Anggaran Tambahan (ABT) pada anggaran yang targetnya telah tercapai sebelum triwulan IV

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

1. Anggaran Permakanan masih tergabung di rekening kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. yang berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.
2. Adanya beberapa mutu layanan yang tidak teranggarkan al : Fasilitas Adminduk, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan, dan Layanan Penelusuran Keluarga. Hal ini disebabkan karena rekening tersebut pada saat itu belum muncul di Aplikasi SIPD.

Solusi:

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran SPM sesuai dengan mutu layanan SPM yang telah ditetapkan kemensos yang dituangkan dalam renja dinas social tahun berikutnya.



2. Melakukan rapat internal dengan pemegang program untuk mempedomani juknis penyusunan anggaran SPM

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Pelaksanaan pemberian mutu layanan pada klien berdasarkan hasil asesment peksos, sehingga tidak semua mutu layanan diberikan pada klien sebagaimana yang telah ditargetkan.
2. Target yang telah ditetapkan pada perencanaan awal dapat berubah dikarenakan ada yang meninggal, pindah keluar daerah

Solusi:

Optimalisasi pemegang program SPM Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatannya.



4. 7. Program dan Kegiatan

Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dijabarkan melalui program dan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing masing Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Berikut program dan kegiatan pelaksanaan Percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

Table 4.36

Program dan kegiatan percepatan penerapan SPM

URUSAN PENDIDIKAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						7.288.424,449
Angka Partisipasi Sekolah								
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	656.989,125
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	3.828.500,000
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	86.280,000



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	91,063,684
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	1,064,626,000
Kekhususan PAUD								
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	476,990,408
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	500,715,871
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	275,920,170
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	40,226,432
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	64,479,447
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	85,823,385
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	81,013,375
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	35,796,552



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						42,057.978.089
Angka Partisipasi Sekolah								
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	3,161.817.459
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	143.313.568
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	1,499.837.050
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	14,584.451.636
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	17,679.162.682
Literasi								
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	1,173.966.968
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	81.251.552
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	1,082.676.825
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	149.714.610
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	49.996.847
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	79.532.550



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	80.935,239
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	1,498,849,849
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	35,796,552
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	437.889,470
Keamanan								
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	144,715,046
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	174,070,186
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						33,146,869,818
Angka Partisipasi Sekolah								
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	10,824,092,855
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	4,189,590,710
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	4,319,973,922



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	106.110.000
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	5.504.956.118
Literasi								
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	95.094.723
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	534.522.564
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	66.015.086
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	81.246.864
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	660.608.903
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	35.298.552
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	6.433.351.434
Kebhinekaan								



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	296.008,087

URUSAN KESEHATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. BERAU				3.246.825.324
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.246.825.324
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			3.246.825.324
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	606.525.000
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	703.188.000
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	321.997.572
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	190.959.925
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	105.567.971
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	59.476.181
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	319.229.538
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	59.229.217
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	243.354.564



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	58.984.699
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	355.256.489
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	223.056.168

URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. BERAU				370.126.938,591
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				362.704.802,592
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			362.704.802,592
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	168.828.208
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	5.255.383.999
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	94.517.188,250
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	38.920.476,886
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	3.419.919,750
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	220.423.005,499
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				7.422.135,999
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			7.422.135,999
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	986.701.000



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	6.435.434.999

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. BERAU				346.504.000
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				346.504.000
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			346.504.000
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Top of Form 148.438.600
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Top of Form 198.065.400

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. BERAU				18.308.847.765



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				9,243,037,315
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			2,226,146,643
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1,240,877,426
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	136,461,310
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	293,269,840
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	159,850,920
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	100,707,436
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPnsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	151,922,250
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	143,057,461
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			6,886,708,392
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	217,392,270
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	6,669,316,122
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			130,182,280
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	130,182,280



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				6,173,281,217
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			107,523,919
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	107,523,919
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			1,227,221,547
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	139,768,200
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	243,551,355
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	67,840,107
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	550,478,379
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	225,583,506
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			4,544,236,895
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	53,970,000
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	624,210,730
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	529,316,450
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	3,082,468,265
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	254,271,450
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			294,298,856
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	65,488,554
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	67,228,747
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	31,350,980



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	130,230,575
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				2,892,529.233
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			1,911,441.794
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	710,598,144
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	117,303,550
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	192,737,800
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	890,802,300
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			125,255,558
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	125,255,558
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			739,077,187
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	198,933,837
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	346,654,426
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	193,488,924
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			116,754,694
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	116,754,694



URUSAN SOSIAL

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	KAB. BERAU				2,244,426,361
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,244,426,361
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,485,534,943
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	204,086,200
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	78,013,244
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	38,834,100
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	126,515,835
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	130,337,700
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	82,974,000
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	55,119,640
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	19,695,310
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	116,941,770
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	417,933,634
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	52,435,710
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	160,647,800
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			758,891,418
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	347,287,652



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	151.770,600
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	60.677,460
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	111.720,021
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	87.435,685



BAB V

P E N U T U P

Capaian Kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau, sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

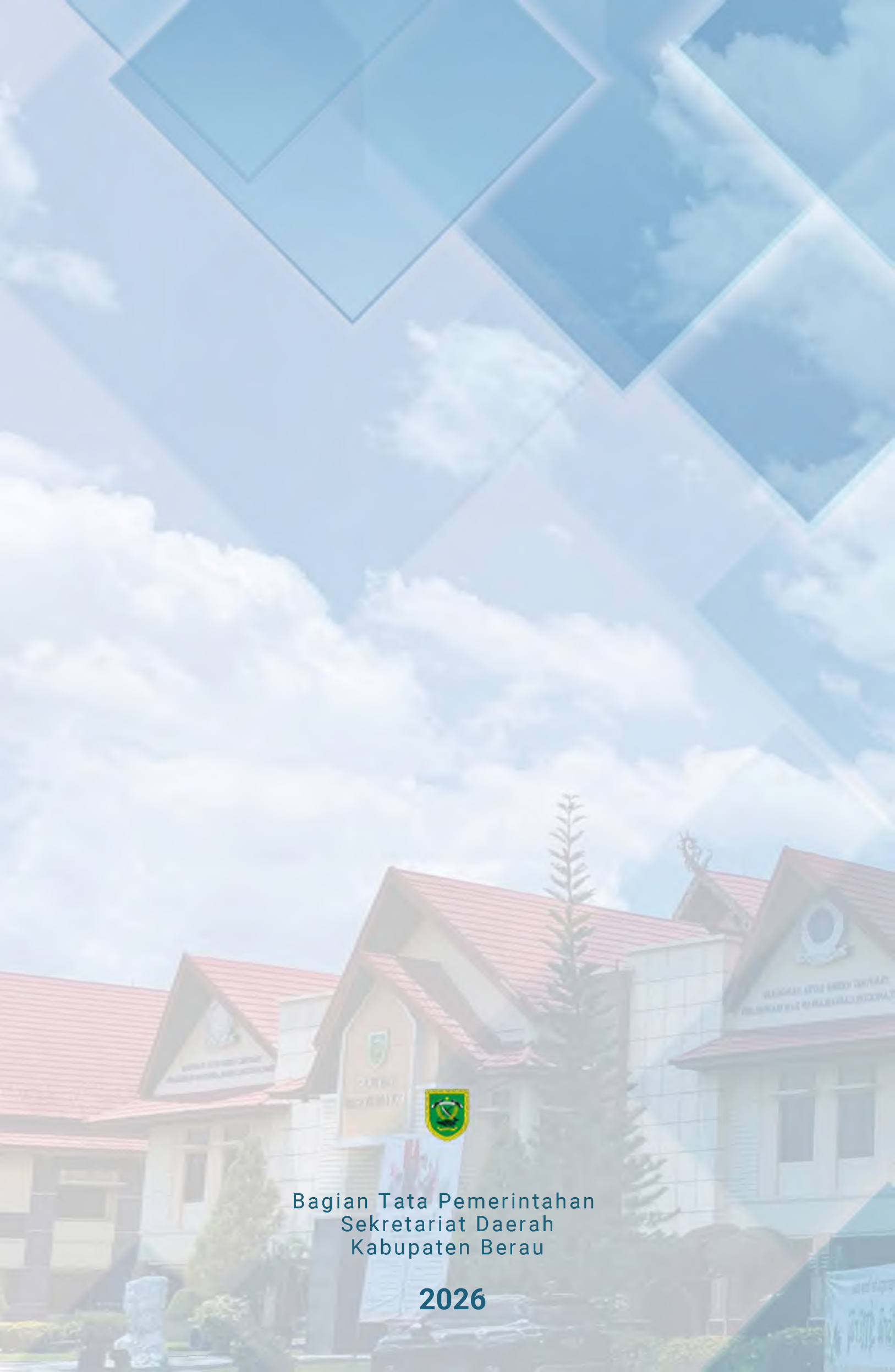
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau disampaikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar Pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tanggal 27 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Dirjen OTDA No : 100.2.7/989/OTDA Tanggal 12 Februari 2026 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai Kepala Daerah, kami mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai pemerintahan terdahulu akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau dimasa mendatang. Tantangan terbesar Kabupaten Berau adalah menyiapkan Kabupaten Berau agar kedepannya semakin maju dan dapat memperoleh manfaat dari proses pembangunan secara berkelanjutan, terkemuka, berdaya saing dan mandiri.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Berau, yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa selalu memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian, Aamiin.



Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau

2026